

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN SISTEM
INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
DANA DESA DENGAN RELIGIUSITAS PERANGKAT DESA SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**

(Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Mranggen)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata S.1 Dalam Akuntansi Syariah



Oleh:

MUKHAMAD ABDUL MUTOHAR

NIM: 2005046081

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi An.

Muhammad Abdul Muthohar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah Skripsi saudara :

Nama : Muhammad Abdul Muthohar

NIM : 2005046081

Jurusan : S1 Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN RELIGIUSITAS PERANGKAT DESA SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI KASUS DESA SE KECAMATAN SAYUNG)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Februari 2024

Pembimbing I

H. Ade Yusuf Mujaddid, M. Ag.
NIP. 196701191998031002

Pembimbing II

Dr. Setyo Budi Hartono, S. AB, M. Si
NIP. 198511062015031003

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Nama : Mukhamad Abdul Mutohar
NIM : 2005046081
Judul : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Religiusitas Perangkat Desa Sebagai Variabel Moderasi
(Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Mranggen)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude/baik/baik, pada tanggal :

15 Maret 2024

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 20 Maret 2024

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Riza Rizki Faozan Syakur, SH., M.E
NIP. 199106202019031000

Penguji I

Dr. Batno Agriyanto, M.Si., A.Kt
NIP. 198001282008011010

Pembimbing I

Dr. H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag
NIP. 196701191998031002

Sekretaris Sidang

Dr. Setyo Budi Hartono, M.Si
NIP. 198511062015031003

Penguji II

Arief Darmawan, M.Pd
NIP. 198804222020121002

Pembimbing II

Dr. Setyo Budi Hartono, M.Si
NIP. 198511062015031003



MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Inna ma'al-'usri yusrā"

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"

(Q.S Al-Insyirah : 6)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan segenap ketulusan hati dan rasa syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tua saya tercinta Bapak Suma'adi dan Ibu Siti Munazilah yang telah membesarkan saya, mendidik dengan memberikan penuh kasih sayang, memberikan dukungan, mengajarkan saya berbagai hal serta selalu mendoakan saya yang terbaik untuk kesuksesan saya. Serta kepada kedua adik saya Fika khoirunnisa dan Muhammad Agung Rif'anul Najib yang senantiasa menjadi penyemangat saya.
2. Wali dosen, Bapak Prof. Dr. H. Musahadi, M.Ag yang telah memberikan arahan saya selama diperkuliah ini. Dosen pembimbing Bapak Dr. H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag dan Bapak Dr. Setyo Budi Hartono, S.AB., M.Si yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing, memberikan arahan, saran dan kritik sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin.
3. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya prodi Akuntansi Syariah yang selalu memberikan ilmu yang bermanfaat serta dukungan kepada mahasiswanya agar dapat berhasil dalam segala hal.
4. Seluruh keluarga besar akuntansi syariah angkatan 2020 khususnya AKS-C yang selalu kebersamai saya selama perkuliahan ini sehingga menjadikan perkuliahan ini semakin berwarna, terkhusus seseorang yang spesial yang selalu menemani dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat, teman-teman terkasih, siapapun dan dimanapun kalian berada yang senantiasa menemani, memberikan dukungan, saling menguatkan bersama, kalian sudah saya anggap sebagai bagian dari keluarga saya. Terima kasih atas semua hal yang kalian berikan kepada saya. Saya selalu doakan yang terbaik buat kalian semuanya. Semoga Allah mepermudah segala urusan kita semua dan memberikan kita kesuksesan.

Semoga semua yang telah diberikan dalam bentuk apapun kepada penulis, senantiasa mendapat balasan yang melimpah dari Allah SWT. Dengan adanya skripsi ini, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Demikian pengantar yang dapat penulis sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan mohon maaf sebanyak-banyaknya.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan rasa penuh tanggungjawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini original dan belum pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Hasil skripsi dibuat dengan penuh kejujuran dari pemikiran penulis, kecuali informasi referensi yang dijadikan sebagai bahan referensi.

Semarang, 3 Maret 2024

Deklarator,



Mukhamad Abdul Mutohar
2005046081

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, namalembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu pedoman transliterasi sebagai berikut :

A. Konsonan

ء = ' (alif)	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ' (ayin)	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

اَ - = a

اِ - = i

اُ - = u

C. Diftong

أَيَّ = ay

أَوْ = aw

D. Syaddah (ّ -)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطَّبَّ *al-thibb*

E. Kata Sandang (... ال)

Kata sandang (... ال) ditulis dengan *al-* misalnya الصنّاعة = *al-shina'ah*. *Al-* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat

F. Ta, Marbuttoh (ة)

Setiap ta' marbuttah ditulis dengan "h" misalnya المعيشن الطبيعي = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, serta untuk mengetahui apakah religiusitas perangkat desa dapat memoderasi hubungan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dan untuk mengetahui religiusitas perangkat desa dapat memoderasi hubungan sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan jenis data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh desa di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dengan total 49 desa. Kemudian teknik pengambilan sampel menggunakan rumus slovin sehingga diperoleh sampel sebanyak 33 desa. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan aplikasi WarpPLS 7.0.

Hasil penelitian menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, religiusitas perangkat desa tidak memoderasi hubungan sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata kunci: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, Religiusitas Perangkat Desa, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

ABSTRACT

The aim of this study is to find out the influence of government internal control systems and accounting information systems on accountability of village fund management, as well as to know whether the religiousness of the village device can moderate the relationship of the government's internal control system to the accountableness of rural fund management and to know that the religion of village devices can Moderate the relation of the accountancy information system to accounting of village money management.

The research method used is a quantitative method using the type of primary data obtained by distributing the questionnaire directly to the respondents. The population used in this study is the entire village in Sayung and Mranggen district of Demak with a total of 49 villages. Then the sampling technique used the Slovenian formula so that we obtained samples of 33 villages. The data obtained was processed using the WarpPLS 7.0 application.

The results of the research indicated that the internal control system of the government and the accounting information system have a positive influence on accountability of village fund management, the religiousness of the village device does not moderate the relationship between the internal system of government control and the information system of accounting to accountable management of village money.

Keywords: Government Internal Control System, Accounting Information System, Village Device Religion, Village Fund Management Accountability

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum WR. Wb

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Religiusitas Perangkat Desa Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus di Desa di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Mranggen)" sebagai tugas akhir guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi dalam Ilmu Akuntansi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak lepas atas bantuan, dorongan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M, Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. Muhammad Saifullah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta segenap jajaran dekanat FEBI Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto., M.Si., Akt., CA., CPAi selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah dan Bapak Warno, SE., M.Si., SAS selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
4. Bapak Prof. Dr. H. Musahadi, M.Ag selaku wali dosen yang telah membimbing saya serta menjadi orag tua kedua saya selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
5. Bapak Dr. H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag dan Bapak Dr. Setyo Budi Hartono, S.AB., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing, memberikan saran, bantuan serta dorongan selama proses penyusunan skripsi dari awal sampai terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya segenap dosen S1 Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah

memberikan bekal ilmu pengetahuan, praktik maupun agama yang sangat bermanfaat selama perkuliahan ini.

7. Kedua orang tua saya, Bapak dan Ibu terima kasih atas segala doa, dukungan serta pengorbanan yang tiada pernah ada habisnya agar saya bisa menyelesaikan studi S1 ini. Serta terima kasih juga untuk kedua adik saya atas dukungannya
8. Teman-temanku dan teman-teman Akuntansi C angkatan 2020, terima kasih untuk semua keceriaan yang telah memberikan warna di setiap langkah selama menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
9. Semua pihak yang telah berjasa dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas bantuannya

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan membantu pihak-pihak yang berkepentingan

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 3 Maret 2024

Mukhamad Abdul Mutohar

2005046081

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	17
1.1 Latar Belakang	17
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Stewardship Theory	11
2.1.2 Akuntabilitas	12
2.1.3 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	14
2.1.4 Sistem Informasi Akuntansi.....	16
2.1.5 Religiusitas Perangkat Desa.....	20
2.2 Telaah Penelitian Sebelumnya	24
2.3 Perumusan Hipotesis	28
2.4 Kerangka Berpikir Penelitian	33

BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis dan Sumber Data	34
3.2 Populasi dan Sampel	34
3.3 Teknik Pengumpulan Data	36
3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	36
3.5 Metode Analisis Data	39
3.5.1 Analisis Structural Equating Modeling (SEM) – Partial Least Square (PLS) ...	39
3.5.2 SEM-PLS dengan Efek Moderasi	39
3.5.3 Analisis Jalur	39
3.5.4 Evaluasi Model	40
3.5.5 Pengujian Hipotesis	43
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	44
4.1 Hasil Penelitian	44
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	44
4.1.2 Deskriptif Data Penelitian	46
4.1.3 Karakteristik Responden	47
4.1.4 Deskripsi Variabel Penelitian	49
4.1.5 Analisis Data	54
4.1.6 Evaluasi Model	54
4.2 Pembahasan Penelitian	61
BAB V PENUTUP.....	67
5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Keterbatasan Penelitian	68
5.3 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Sebelumnya.....	24
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel	37
Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	47
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir.....	47
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Responden.....	48
Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjabat.....	48
Tabel 4. 5 Deskripsi Tanggapan Responden Berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X1).....	49
Tabel 4. 6 Deskripsi Tanggapan Responden Berdasarkan Sistem Informasi Akuntansi (X2)	50
Tabel 4. 7 Deskripsi Tanggapan Responden Berdasarkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y).....	51
Tabel 4. 8 Deskripsi Tanggapan Responden Berdasarkan Religiusitas Perangkat Desa (Z)...	53
Tabel 4. 9 Uji <i>Convergent validity</i>	54
Tabel 4. 10 Analisis <i>Average Varian Extracted</i>	55
Tabel 4. 11 Hasil composite reliability	56
Tabel 4. 12 Nilai Akar AVE dan Korelasi Variabel Laten	56
Tabel 4. 13 Nilai R^2 , Q^2 , F^2	57
Tabel 4. 14 Goodness of Fit Model	58
Tabel 4. 15 Nilai Path Coefficient dan Nilai P-Value	59
Tabel 4. 16 Hasil Evaluasi Hubungan Moderasi	60
Tabel 4. 17 Hasil Pengujian Hipotesis	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Sayung dan Mranggen	46
Gambar 4. 2 Full Model Penelitian.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyaknya kasus korupsi terkait dana desa di Indonesia. selama periode 2015-2021 tidak kurang dari Rp. 433,8 miliar dana desa yang dikorupsi dan terjadi 592 kasus korupsi di tingkat desa dengan sebanyak 729 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga penyelewengan dana desa termasuk dalam daftar tiga teratas kasus korupsi di Indonesia (Kompas.id). Jawa Tengah termasuk salah satu dari provinsi dengan tingkat kasus korupsi terbanyak di Indonesia. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahun 2004-2021. Jawa tengah menempati posisi ke tujuh menjadi provinsi terkorup di Indonesia dengan 51 kasus (tribunnews.com). Akhir ini telah banyak terjadi kasus korupsi penyelewengan dana desa di berbagai desa di daerah Kabupaten Demak. Salah satu kecamatan yang terjadi penyelewengan dana desa adalah Kecamatan Sayung, dengan berbagai kasus yang terjadi di beberapa desa di kecamatan tersebut. Seperti contoh pada tahun 2023 kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Surodadi, Kecamatan Sayung senilai Rp. 747 juta. Kemudian Kepala Desa Gemulak, Kecamatan Sayung melakukan korupsi senilai Rp. 570 juta. Kepala Desa Loireng, Kecamatan Sayung menjadi terdakwa atas dugaan korupsi dana desa sebesar Rp 302 juta. Kemudian dugaan pelanggaran korupsi sejumlah proyek dana desa di desa Sidogemah Kecamatan Sayung. Dengan jumlah korupsi dan penyelewengan dana desa yang tinggi di Kabupaten Demak khususnya pada kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, maka diperlukan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan dana desa tersebut.

Dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain: sistem pengendalian internal pemerintahan, pemahaman perangkat desa, kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, pengawasan, transparansi. kualitas auditor eksternal, sistem informasi akuntansi dan kejelasan sasaran anggaran juga merupakan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sistem pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah adalah sebuah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan oleh pimpinan dan seluruh aparat yang

terkait yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan undang undang yang berlaku. Sedangkan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang dilakukan secara menyeluruh pada lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. (PP No.60 2008)

Sistem pengendalian internal pemerintah berguna dalam mengawasi praktik dan memandu kredibilitas urusan keuangan suatu instansi pemerintah. Pengendalian internal juga dilakukan untuk memastikan pengelolaan sumber daya yang memadai dan akuntabilitas yang tepat. Sistem pengendalian internal pemerintah juga membantu dalam memastikan pengeluaran anggaran dapat diandalkan, layak dan memberikan jaminan bahwa semua pengeluaran anggaran dana desa yang dikeluarkan dan program desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Membantu dalam pencegahan, otorisasi dan kontrol penggunaan dana desa. Sehingga dapat meminimalisir terhadap terjadinya risiko. Sistem pengendalian internal mencakup pemisahan tugas, perekrutan dan pelatihan staf aparatur desa yang berkualifikasi. Bahkan dapat membantu mencegah tindakan yang tidak diinginkan dalam pemerintahan desa (Adeyemi & Olarewaju, Jurnal AUDCE, Vol.15, No.1 2019: 136)

Dalam pengelolaan dana desa, melibatkan sejumlah transaksi mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah. Jika dalam pengelolaan dana desa tidak dikelola dengan baik, dapat berdampak negatif terhadap kinerja pemerintahan serta menghambat produktivitas. Sehingga diperlukan sistem pengendalian yang baik untuk mengawasi dan mengontrol kinerja keuangan dana desa supaya dipergunakan dengan tepat dan mempercepat produktivitas pemerintah. Pengendalian internal membantu kepala desa untuk mendapatkan ukuran terbaik dari dampak berbagai transaksi yang dilakukan atas penggunaan dana desa, sehingga meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang tepat. Dengan sistem pengendalian internal pemerintah yang baik, dapat memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dilakukan secara efektif, dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sistem pengendalian internal pemerintah yang kuat dapat membantu instansi pemerintah lebih efisien dan efektif dalam mengelola dana desa. Sehingga dapat menimbulkan manfaat-manfaat bagi instansi pemerintah. Seperti mendeteksi dan mencegah kesalahan serta penyimpangan yang terjadi dalam instansi, melindungi kepentingan aparatur dengan secara khusus menyatakan tugas dan tanggung jawab mereka, serta melindungi mereka dari tuduhan penyimpangan atau penyelewengan. Pemerintah desa memerlukan sistem pengendalian internal agar kegiatan dalam pemerintah mulai dari perencanaan, implementasi, pengawasan dan tanggung jawab harus dilakukan secara tertib, terkontrol, efisien dan efektif. Dengan

adanya pengendalian internal yang tepat akan mampu memberikan dampak pada pemerintah desa dalam menentukan pemilihan kebijakan internal serta mampu menimbulkan implikasi yang berdampak baik pada pemerintah desa dalam menjaga akuntabilitas (Desy et al., 2020)

Sistem pengendalian intern pemerintah di Kabupaten Demak diatur dalam Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak. Dengan diaturnya peraturan terkait sistem pengendalian intern pemerintah di Kabupaten Demak menunjukkan bahwa SPIP sudah terintegrasikan dengan baik, namun kenyataannya SPIP pada daerah Demak masih tergolong lemah karena masih belum berjalan dengan secara optimal dikarenakan peraturan ini masih tergolong baru yang ditetapkan dan mulai berlaku tanggal 17 Oktober 2022. Sehingga belum secara optimal merata diterapkan di seluruh wilayah pemerintahan Demak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah Kabupaten Demak masih tergolong lemah (Perbup Demak No. 43 Tahun 2022).

Sistem informasi akuntansi adalah sebuah komponen yang penting dalam pemenuhan kebutuhan yang tepat dan akurat dalam proses akuntansi, yang terdiri dari alat teknologi (*software* dan *hardward*) yang dijalankan oleh sumber daya manusia. Sistem informasi akuntansi adalah alat yang perlu digunakan oleh akuntan untuk tetap menjaga keunggulan kompetitif ditengah kemajuan teknologi yang pesat. Menurut Chit (Internasional Journal of the Economics of Business, 2019: 329-354) menjelaskan bahwa SIA berupa sistem elektronik berbasis komputer yang digunakan dalam mengumpulkan, menyimpan, mengolah dan mengkomunikasikan data keuangan dan akuntansi melalui laporan keuangan, dengan tujuan mendukung serta membimbing dalam proses pengambilan keputusan organisasi. SIA terdiri dari subsistem utama, yaitu: sistem pemrosesan transaksi, buku besar, sistem pelaporan manajemen dan subsistem untuk menangani transaksi keuangan dan non keuangan.

Sistem informasi akuntansi dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa. Pemanfaatan teknologi melalui sistem informasi akuntansi pengelolaan dana desa menjadi solusi dari permasalahan yang berhubungan dengan keterandalan pelaporan dalam laporan keuangan. Penggunaan sistem informasi akuntansi dapat mempercepat pelaporan keuangan sehingga sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan serta dapat mempermudah dalam pemrosesan data pembuatan laporan keuangan. Pemerintah desa harus mampu mengelola dana desa secara transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan, hal tersebut sama dengan sistem informasi akuntansi yang saat ini masih banyak yang menganggap lemah dan masih belum sesuai. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) sangat diperlukan dalam pengelolaan dana desa

desa, dikarenakan akan menentukan pengelolaan dan penggunaan dana desa tersebut. Sistem Informasi Akuntansi diartikan sebagai catatan dan laporan koordinasi sedemikian rupa yang didalamnya menyediakan berbagai informasi keuangan yang dibutuhkan pemerintah desa untuk mempermudah dalam pengelolaan dana desa (Suun et al, Celebes Journal of Community Service, 2022: 44-50). Adanya Sistem Informasi Akuntansi yang sesuai dengan ketentuan dapat mencegah kekeliruan yang dapat merugikan negara serta dapat mencegah penyelewengan dana desa sehingga dapat menimbulkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Desa yang sudah menggunakan sistem informasi akuntansi secara tertata akan lebih mudah dalam pemrosesan input data setiap transaksi yang dilakukan dalam penggunaan dana desa. Pengelolaan dana desa menggunakan sistem informasi akuntansi juga dapat menghemat ruang dalam penyimpanan data pengelolaan sehingga bisa digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama. Kecepatan dan ketepatan dalam pemrosesan data juga akan menghemat waktu bekerja dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan secara manual (Ismail et al., Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 19, No. 2, Agustus 2016: 329). Penggunaan sistem informasi akuntansi dapat menghindarkan dari kesalahan pemrosesan data. Sehingga data yang dihasilkan juga akan berkualitas, relevan serta akurat. Dengan data berkualitas yang dihasilkan, akan membuat laporan keuangan yang dihasilkan juga berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga laporan keuangan mengenai pengelolaan dana desa akan lebih akuntabel, yang berdampak pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sistem informasi akuntansi di Demak sudah mulai tertata, dikarenakan pada akhir bulan november telah diluncurkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Online Terintegasi Cash Management System CMS Bank Jateng atau E-TEKAD (Elektronik Transaksi Keuangan Desa) yang bertujuan untuk meminimalisir penyalahgunaan dana desa serta membuat tat kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Namun, penggunaan sistem tersebut masih belum bisa optimal dikarenakan sistem tersebut tergolong masih baru, sehingga masih harus beradaptasi dalam menjalankan sistem tersebut. Dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi di Demak sudah mulai tertata dengan baik, namun belum berjalan secara optimal.

Religiusitas melekat erat pada kehidupan Indonesia, serta memainkan peran penting pada tingkat individu. religiusitas dapat digunakan sebagai *controlling* terhadap suatu instansi pemerintah terutama terhadap pemangku kepentingannya. Religiusitas mendorong perangkat desa untuk patuh terhadap prinsip-prinsip agama serta mencerminkan perilaku komitmen terhadap agama. Religiusitas pada tingkat perusahaan atau instansi dapat mempengaruhi

aspek karakteristik, perilaku budaya seperti kode etik dan identitas moralnya. Interaksi religiusitas individu dan instansi diharapkan memiliki dampak yang signifikan pada proses pengelolaan keuangan dana desa. Religiusitas dalam instansi pemerintah desa cenderung memiliki keyakinan agama yang homogen. Hal tersebut dikarenakan aparat desa itu sendiri merupakan masyarakat setempat, sehingga cenderung memiliki kesamaan satu dengan yang lainnya.

Kabupaten Demak dengan julukan kota wali merupakan daerah yang terkenal dengan tingkat religiusitasnya yang tinggi. Karena dahulu merupakan kerajaan Islam pertama di pulau Jawa. Tingkat religiusitas masyarakat Demak terbukti dengan banyaknya warga yang mengenyam pendidikan berbasis agama. Banyaknya pondok pesantren serta majlis taklim maupun madrasah diniyah (madin) yang tersebar di daerah Demak menjadikan bukti bahwa mayoritas masyarakat Demak telah mengenyam pendidikan agama. Banyaknya budaya yang bersifat religius di Demak yang masih dilestarikan sampai sekarang. Seperti tradisi grebek besar, apitan atau sedekah bumi, megengan, dan tradisi syawalan menjadikan bukti bahwa masyarakat masih memegang budaya religiusnya.

Religiusitas perangkat desa akan mempengaruhi sistem pengendalian internal pemerintah. Penggunaan sistem pengendalian internal yang baik belum tentu akan menghasilkan kontrol yang baik pula. Religiusitas perangkat desa berperan dalam menyempurnakan serta mempertahankan sistem pengendalian internal yang telah digunakan. Adanya religiusitas perangkat desa yang tinggi akan membuat membuat pengendalian internal berjalan lebih baik. Karena individu yang bersangkutan akan berusaha menaati dan patuh terhadap kebijakan yang dibuat guna pengendalian internal. Sehingga kinerja dalam pemerintahan akan lebih efektif dan efisien yang berdampak pada keteraturan kinerja, pemilihan kebijakan internal, serta dapat menimbulkan implikasi yang baik pada pemerintah desa dalam menjaga akuntabilitas, terutama pada pengelolaan dana desa.

Religiusitas perangkat desa akan membuat sistem pengendalian intern menjadi lebih optimal. karena perangkat desa yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi akan berusaha mematuhi setiap peraturan yang dibuat dan berusaha menjauhi dari tindak kecurangan. Meskipun sistem pengendalian intern pemerintahan di Demak sudah tertata dengan baik, namun belum secara optimal berjalan. Dengan adanya perangkat desa yang religius akan membuat sistem pengendalian intern pemerintah dilaksanakan dengan baik dan berjalan dengan optimal.

Penggunaan sistem informasi akuntansi yang sudah tertata baik tanpa diimbangi dengan sikap religiusitas dari pengelola keuangan tetap akan menimbulkan risiko penyalahgunaan dan penyelewengan. Sistem informasi akuntansi dijalankan oleh individu, sehingga sikap

religiusitas akan berdampak pada mengolah data menggunakan sistem informasi akuntansi. Perangkat desa jika memiliki sikap religiusitas yang tinggi, maka proses penginputan data dilakukan secara hati-hati dan berusaha menghindari adanya kecurangan. Sehingga laporan yang dihasilkan menggunakan sistem informasi akuntansi dengan pengelola yang berreligiusitas tinggi, akan menghasilkan laporan yang berkualitas, transparan dan akuntabilitas.

Sistem informasi akuntansi pengelolaan dana desa di Demak sudah terintegrasi dengan tujuan mencegah adanya tindak kecurangan maupun penyelewengan dana desa. Namun, sistem tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dengan adanya perangkat desa yang religius dalam pengelolaan dana desa dapat menjadi solusi dalam permasalahan tersebut. Dengan adanya perangkat desa pengelolaan dana desa yang religius, akan berusaha menghindari dari tindak kecurangan dan menginput data sesuai yang sebenarnya. Meskipun belum dibantu dengan sistem yang baik, namun dengan perangkat desa yang religius dapat membuat laporan keuangan menjadi transparan dan akuntabel.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa antara lain, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Husain et al (*Jambura Accounting Review Journal homepage*, 2023: 66-76) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang artinya bahwa semakin baik tingkat pengendalian internalnya maka semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian tersebut didukung dengan beberapa penelitian yang dilakukan oleh Arthur S et al., (2023), Budiana et al., (2019), Budi Hendaris et al. (2020), Aziz et al. (2015), Adeyemi & Olarewaju, (2019), Brenya Bonsu et al. (2022). Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Silvia et al., (2023), Ridwan et al. (2023), Tiarno M. & Budiwitjaksono S, (2023), Dewi et al. (2021), dan Alam et al. (2019), yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) secara signifikan tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor lainnya yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah Kompetensi aparatur desa. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hilda Agustin et al. (*Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 2023: 867-876), menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Arthur S et al. (2023), Ahmad & Sapar (2023), Devi E. et al. (2023), Chalista R. et al. (2023), Maulana Irwadi, Kemas Welly Angga Permana (2023) Maulana I et al. (2023), Budi Hendaris et al. (2020), Alam et al. (2019), Aziz et al. (2015), Brenya Bonsu et al. (2023). Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang

dilakukan oleh , Ridwan et al. (2023), Tiarno M. & Budiwitjaksono S, (2023), dan Heriningsih & Sudaryati. (2019), yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi informasi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hilda Agustin et al. (*Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 2023: 867-876), Penelitian tersebut menyatakan bahwa pemanfaatan informasi teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang artinya semakin baik tingkat pemanfaatan teknologi informasi teknologi dalam mengelola dana desa, maka semakin baik pula tingkat akuntabilitasnya. Hasil penelitian tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Audia & Mulyani (2023), Dewi et al. (2021), yang menunjukkan hasil yang sama. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Arthur S et al. (2023), dan , Ridwan et al. (2023) yang menyatakan pemanfaatan teknologi informasi tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh kejelasan sasaran anggaran juga mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, seperti penelitian yang dilakukan oleh Hilda Agustin et al. (*Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 2023: 867-876), yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ronal et al. (2023), Estrilia et al. (2023). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Audia & Mulyani (2023), yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa lainnya adalah partisipan masyarakat desa. Penelitian yang dilakukan oleh Ronal et al. (2023), menunjukkan bahwa partisipan masyarakat desa berpengaruh positif secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad & Sapar (2023), Chalista R. et al. (2023). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Arthur S et al. (2023), dan Muh. Yasir. et al. (2023), yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ahmad & Sapar (*Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia*, 2023: 81-93), yang menjelaskan bahwa sistem keuangan desa berpengaruh positif secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan desa. Penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Bawono et al. (2020),

dan Budi Hendaris et al. (2020) yang juga menjelaskan bahwa sistem keuangan desa berpengaruh positif secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Tiarno M. & Budiwitjaksono S, (2023), yang menunjukkan bahwa sistem keuangan desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh kualitas auditor juga dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Machinjike et al. (2021), menjelaskan bahwa kualitas auditor berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Kaawaase et al. (*Asian Journal Accounting Research*, 2021: 348-366), dan Nwoye et al. (*Athen Journal of Business & Economics*, 2021:173-202), yang menjelaskan bahwa semakin baik kualitas auditor dalam pengauditan laporan keuangan dana desa, maka akan semakin baik pula tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa tersebut.

Selain faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, ada juga faktor yang memoderasi antara variabel independen dengan variabel dependennya. Faktor yang memoderasi antara lain partisipasi masyarakat. Seperti penelitian yang dilakukan oleh , Ridwan et al. (2023), yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat memoderasi antara kompetensi pemerintahan desa dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain partisipasi masyarakat, ada penelitian yang menggunakan religiusitas sebagai variabel moderasinya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Heriningsih & Sudaryati. (2019), yang menjelaskan bahwa religiusitas memoderasi faktor *good governance* dan kompetensi pemerintahan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang sebelumnya telah dilakukan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini memasukkan variabel kualitas auditor, sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem informasi akuntansi pengelolaan dana desa dengan religiusitas perangkat desa sebagai variabel moderasi yang mempengaruhi ketiga variabel tersebut terhadap akuntabilitas dana desa dengan studi kasus desa di Kabupaten Demak. Penggunaan variabel independen tersebut dirasa penting karena auditor memiliki peran penting dalam laporan keuangan terutama dalam salah saji laporan. Dalam tahap pengauditan, auditor memeriksa setiap laporan keuangan dan mencari bukti dalam setiap penyajiannya serta mengevaluasi bukti tersebut untuk mendapatkan kredibilitas dan representasi dari informasi keuangan yang diberikan. Sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem informasi akuntansi pengelolaan dana desa berperan penting dalam meningkatkan

akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penggunaan religiusitas perangkat desa sebagai variabel moderasi karena dengan perangkat desa yang memiliki religiusitas tinggi akan membantu apabila kualitas auditor rendah, sistem pengendalian intern pemerintah masih lemah dan sistem informasi akuntansi yang belum merata untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka dapat diambil pokok permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?
2. Apakah Sistem Informasi Akuntansi pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?
3. Apakah Religiusitas Perangkat Desa Memoderasi pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Desa dan Sistem Informasi Akuntansi Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menguji data yang didapatkan secara empiris tentang pengaruh sistem pengendalian intern pemerintahan desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
2. Untuk menganalisis dan menguji data yang didapatkan secara empiris tentang pengaruh sistem informasi akuntansi pengelolaan dana desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
3. Untuk menganalisis dan menguji data yang didapatkan secara empiris tentang apakah religiusitas perangkat desa memoderasi sistem pengendalian intern pemerintahan desa dan sistem informasi akuntansi pengelolaan dana desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan konsep mengenai suatu hal yang berkaitan dengan pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban pemerintah daerah, khususnya mengenai Akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- 2) Pembahasan terhadap masalah-masalah yang dijabarkan pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah desa dan sistem informasi akuntansi pengelolaan dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan religiusitas perangkat desa sebagai variabel moderasi.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan serta kontribusi bagi ilmu pengetahuan serta dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian berikutnya yang serupa dalam studi khususnya pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Pemerintah Kabupaten, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi, masukan, kritikan dan saran serta dapat sebagai bahan acuan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- 2) Bagi pemerintah desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, masukan, kritikan dan saran mengenai sistem akuntansi pengelolaan dana desa.
- 3) Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambah wawasan mengenai pemerintahan desa dan akuntabilitas pengelolaan dana desa sehingga diharapkan peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan serta menambah pengetahuan dalam menyusun penelitian yang benarsekaligus sebagai tugas akhir yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar S. Akun pada program studi akuntansi syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Stewardship Theory

Penelitian ini didasari dengan grand theory stewardship theory. Menurut Donaldson & Davis (*Australian Journal of Management*, 1991: 49-64) teori stewardship secara singkat menjelaskan dimana situasi manajer itu sebagai steward (pelayan) dan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Teori ini juga disebut sebagai pertimbangan teoretis yang memperdebatkan pandangan alternatif motivasi manajerial terhadap teori keagenan. Berdasarkan teori ini, seorang manajer eksekutif atau pimpinan bukanlah seorang oportunistik, namun pada dasarnya ingin melakukan pekerjaannya atau mengelola aset perusahaan dengan baik. Teori stewardship juga berpendapat bahwa variasi kinerja muncul dari struktural yang dimana pimpinan berada memfasilitasi dari tindakan efektif yang dilakukan oleh pimpinan, dan struktur akan memfasilitasi tujuan dari organisasi sejauh yang mereka mampu. Donaldson dan David juga mendefinisikan teori stewardship sebagai penggambaran suatu keadaan di mana dewan atau pemimpin tidak termotivasi untuk mencapai tujuan individu, melainkan terhadap hasil utama untuk melayani organisasi. Hipotesis ini mengharapkan adanya area kekuatan untuk pemenuhan antara pemenuhan dan pencapaian hierarki. Dimana pencapaian hierarki menggambarkan peningkatan utilitas pengumpulan/asosiasi. Memperkuat kegunaan perkumpulan/perkumpulan ini pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan minat orang-orang yang tergabung dalam perkumpulan tersebut.

Dalam teori stewardship menyatakan fokus untuk motivasi instrinsik tidak mudah dinilai/diukur. Dalam hubungan stewardship, bawahan memperkuat faktor instrinsik serta reward merupakan kesempatan untuk bertumbuh, berpresrasi dalam keanggotaan dan beraktualisasi diri. Manajer yang mengidentifikasi diri dengan organisasi akan bekerja dengan mengutamakan tujuan organisasi, memecahkan permasalahan, serta mengatasi hambatan dan rintangan yang akan mencegah kesuksesan dari organisasi (Raharjo, 2007)

Penggunaan *grand theory stewardship* dapat diterapkan pada pengkajian akuntansi sektor publik seperti asosiasi pemerintah dan asosiasi non-manfaat lainnya. Ini telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi untuk hubungan antara *stewards* dan *principals* sejak awal akuntansi sektor publik. Akuntansi berguna sebagai penggerak dalam berjalannya transaksi kearah yang semakin kompleks serta diikuti dengan

pertumbuhan spesialisasi dalam akuntansi dan perkembangan organisasi akuntansi sektor publik. Kondisi ini akan semakin kompleks dengan bertambahnya tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi akuntansi sektor publik, yang dimana principal akan semakin sulit untuk melaksanakan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. Antara fungsi kepemilikan dengan pengelolaan dipisah menjadi semakin terlihat. Berbagai keterbatasan dari pemilik sumber daya (*principals*) mempercayakan pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak lain atau manajemen (*steward*) yang lebih memahami. Hubungan antara *principals* dan *stewards* dilakukan atas dasar kepercayaan, dan bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi. Sehingga model penggunaan *grand theory* pada kasus organisasi akuntansi sektor publik adalah menggunakan *stewardship theory*

2.1.2 Akuntabilitas

2.1.2.1 Pengertian Akuntabilitas

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Halim dan Iqbal (2012) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah suatu kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban atas sebuah kinerja, tindakan atau putusan seseorang maupun organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan pertanggungjawaban tersebut. Kewajiban menjawab dan menjelaskan kinerja atau tindakan seseorang atau suatu organisasi kepada pihak-pihak yang mempunyai hak atau wewenang untuk meminta pertanggungjawaban dalam bentuk laporan dikenal dengan istilah akuntabilitas. Pemikiran di balik tanggung jawab adalah bahwa setiap gerakan atau tindakan pemerintah daerah harus bertanggung jawab kepada daerah setempat. Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk memberikan sebuah pertanggungjawaban seorang/pemimpin terkait sebuah kinerja dalam suatu unit organisasi kepada pihak yang berkak menerima pertanggungjawaban tersebut, pertanggungjawaban dapat berupa informasi laporan dalam segala kegiatan maupun aktifitas pengelolaan keuangan dana desa yang dimana laporan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menjelaskan akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta suatu kebijakan yang dipercayakan kepada sebuah entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan secara periodik. Menurut Widyatama & Novita (2017: 1-20) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan hal utama yang harus dimiliki oleh setiap unsur, baik pelaku bisnis maupun pemerintah, sebagai salah satu bentuk tanggung jawab terhadap *stakeholder*. Sementara itu, tugas pemerintah adalah melayani masyarakat.

Adanya kegiatan atau aktifitas yang dilakukan pemerintah terhadap pengelolaan dana desa, maka dengan itu dibutuhkan informasi berupa laporan atas pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa tersebut. Masyarakat membutuhkan informasi tersebut guna untuk mengetahui sebesar apa sumber daya yang dimiliki serta bagaimana pengalokasian dan pengelolaan sumber daya tersebut.

2.1.2.2 Akuntabilitas Dalam Perspektif Islam

Akuntabilitas merupakan kewajiban yang harus disampaikan kepada yang bersangkutan. Dalam akuntabilitas pemerintahan, maka perangkat desa harus memberi pertanggungjawaban kepada masyarakat. Hal ini juga di jelaskan dalam firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

(النساء: ٥٨)

Artinya: “*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat*” (Q.S An-Nisa:58).

Dalam hadits Bukhori Nomor 844 juga dijelaskan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas segala yang dikerjakannya:

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْنُونَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه البخاري)

Artinya: “*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut.*” Aku menduga Ibnu 'Umar menyebutkan: “*Dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya*”. (H.R. Bukhori)

Pada ayat ini Al-Qur'an mengajarkan tentang amanah. Allah menyuruh manusia untuk menyampaikan amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada yang berhak atas amanat itu, dan dalam ayat ini juga Allah menyuruh untuk menetapkan hukum diantara manusia yang saling berselisih dengan menetapkan keputusan dan hukum yang adil (Tafsir oleh Kemenag RI). Dalam hadits tersebut juga menjelaskan bahwa setiap manusia adalah seorang pemimpin, dan setiap pemimpin harus mempertanggungjawabkan apa yang dipimpinnya. Jadi, dalam dalil tersebut dijelaskan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan terhadap pihak yang terkait. Pertanggungjawaban ini wajib disampaikan karena pertanggungjawaban merupakan hasil dari pemberian amanat, sehingga dalam penyampaian amanat tersebut harus dilaporkan kepada pihak yang berhak menerima pertanggungjawaban tersebut. Dengan adanya akuntabilitas tersebut akan mendorong keadilan diberbagai elemen, sehingga masyarakat akan lebih percaya terhadap pemerintah karena telah mempertanggung jawabkan dengan semestinya.

2.1.3 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

2.1.3.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara konsisten oleh direksi atau pimpinan dan seluruh karyawan guna memberikan keyakinan yang layak atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP terdiri dari beberapa unsur yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan kegiatan intern (Martini et al. *Jurnal Akademi Akuntansi*, Vol. 2, No. 1, 2019: 106-123)

Sistem pengendalian intern pemerintah merupakan salah satu standar intrinsik penting dalam pemerintahan desa yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian intern dapat diartikan sebagai proses dimana organisasi atau instansi menjalankan kegiatannya secara efisien dan efektif, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan serta patuh dan taat kepada hukum yang berlaku (Puspa & Prasetyo, 2020). Pengendalian internal adalah prosedur-prosedur yang digunakan dalam melindungi aset organisasi dari berbagai bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi terkait akuntansi yang akurat, serta dapat memastikan apakah kebijakan hukum yang berlaku sudah dipatuhi dan dijalani dengan semestinya

(Pahlawan et al. *Indonesia Accounting Journal*, 2020: 162-172). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tiarno M. & Budiwitjaksono S, (2023) menjelaskan pengendalian internal adalah pengarahan, pengawasan dan pengukuran terhadap sumber daya organisasi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Iyona & Badu (2023). menyatakan bahwa sistem pengendalian pemerintah adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus untuk menjamin pengakuan akan terwujudnya tujuan pemerintah atas keandalan laporan keuangan, konsistensi atau patuh terhadap peraturan yang diberlakukan serta keamanan sumber daya yang dimiliki.

Sistem pengendalian intern pemerintah dilakukan untuk mengawasi dan tanggung jawab yang dilakukan secara terkontrol, efisien dan efektif serta mendorong pemerintah dalam menentukan pemilihan keputusan secara internal dan mampu menyebabkan timbulnya implikasi yang berdampak baik pada pemerintahan desa dalam menjaga akuntabilitasnya. Dengan adanya pengendalian intern dapat digunakan sebagai alat untuk mengawasi seluruh kegiatan internal dalam pemerintahan untuk mencapai pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan tertib terhadap peraturan yang berlaku. Dengan diberlakukannya SPIP dengan baik, maka akan berdampak pada kinerja aparatur desa yang menjadi semakin baik, sehingga akan meningkatkan dalam segala aspek pekerjaan desa terutama terkait dalam pengelolaan dana desa agar digunakan dengan semaksimal dan sebaik mungkin. (Fauzi & Mujaddid, *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, 2023: 89-104)

2.1.3.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, kegiatan pengawasan ini berkaitan dengan *al-hisbah*, yaitu memerintahkan kepada kebaikan jika meninggalkannya, dan melarang perbuatan mungkar jika mengerjakannya. *Al-hisbah* dan sistem pengendalian intern memiliki dasar yang sama, yaitu bertujuan untuk mencegah perbuatan kemungkar (Hasanah R. 2018:4). Hal tersebut telah dijelaskan dalam firman Allah *subhanahu wa ta'ala*. Dalam surat Al-Imran ayat 104.

وَأَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

(آل عمران: ١٠٤)

Artinya: “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung”. (Q.S Al-Imran:104).

Sistem pengendalian intern pemerintah juga dijelaskan dalam Hadist Arbain An-Nawawi sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Abu Said Al Khudri ra, dia berkata: “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: ‘Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia ubah dengan tangannya (kekuasaannya). Kalau dia tidak mampu hendaknya dia ubah dengan lisannya dan kalau dia tidak mampu hendaknya dia ingkari dengan hatinya. Dan inilah selemah-lemahnya iman.’” (HR Muslim)

Mengutip dari Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2 yang ditulis oleh Syekh al-Imam al-Hafid Abu al-Fida’ Imanuddin Isma’il Bin Umar Katsir Dhau’ bin Katsir al-Quraisy al-Dimasqy atau lebih dikenal dengan Ibnu Katsir, inti dari ayat tersebut menyuruh manusia untuk berbuat *amar ma’ruf nahi mungkar* (memerintahkan berbuat kebaikan dan melarang berbuat keburukan). Menurut Tafsir Al-Misbah Jilid 2 (2006), yang ditulis oleh M. Quraish Shihab menjelaskan ayat tersebut mengandung perintah kepada umat islam untuk menempuh jalan yang berbeda dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Yakni memerintahkan untuk menempuh jalan yang lurus serta mengajak orang lain terhadap kebaikan dan mencegah keburukan. Apabila orang muslim menjalankan hal tersebut, maka termasuk sebagai orang-orang yang beruntung (<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6622840/surat-ali-imran-ayat-104-penyeru-amar-maruf-nahi-munkar-adalah-yang-beruntung>, akses 10 Oktober 2023).

Dari ayat tersebut, sudah dijelaskan bahwa Allah *subhanahu wa ta’ala* memerintahkan hamba-Nya untuk mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan. Hal tersebut selaras dengan fungsi atau tujuan adanya sistem pengendalian intern pemerintah, yang dimana pengendalian intern tersebut bertujuan untuk mencegah berbagai hal yang tidak diinginkan, seperti penyalahgunaan dan penyelewengan serta melindungi aset organisasi dengan cara pengarahan, pengawasan dan pengukuran terhadap sumber daya serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

2.1.4 Sistem Informasi Akuntansi

2.1.4.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data guna menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Sistem Informasi Akuntansi menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk membuat keputusan keuangan yang tepat.

Informasi yang diberikan oleh akuntansi terutama dalam hal keuangan dan berkaitan dengan lembaga tertentu. Sistem Informasi Akuntansi terdiri dari subsistem utama, yaitu: sistem pemrosesan transaksi, buku besar, sistem pelaporan manajemen dan subsistem untuk menangani transaksi keuangan dan non keuangan. Sistem ini dapat berjalan dengan bantuan sumber daya seperti manusia dan peralatan tertentu (Abdelraheem et al. 2021: 191-196).

Pengertian akuntansi menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan adalah suatu proses mengidentifikasi, mencatat, mengukur, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta menginterpretasikan hasil. Sedangkan akuntansi keuangan daerah adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, melaporkan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah yang selanjutnya dijadikan jenis informasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak luar pemerintah daerah yang membutuhkannya (*stakeholder*). Akuntansi pemerintahan memiliki tujuan pokok yaitu: pertanggungjawaban, berupa dengan memberikan informasi terkait keuangan yang lengkap, tepat, dan berguna dan juga pertanggungjawaban ini meliputi tindakan dalam penggunaan sumber daya. Kemudian manajerial, berupa penyediaan informasi keuangan untuk tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, serta perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam penilaian kinerja pemerintah (Ismail et al., *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 19, No. 2, Agustus 2016: 329). Dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi pengelolaan dana desa adalah sebuah sistem yang dijalankan oleh manusia dengan peralatan tertentu yang berfungsi untuk menyediakan informasi dari proses mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data yang bertujuan untuk pengambilan keputusan terkait keuangan yang tepat mengenai pengelolaan dana desa yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*-nya.

2.1.4.2 Sistem Informasi Akuntansi dalam Perspektif Islam

Pengertian Sistem Informasi Akuntansi secara umum telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Allah *Subhanallahu Wa'taala* berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْخْسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًُا أَوْ ضَعِيْفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيْهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُؤُوا أَنْ تُكْتَبَ لَهُ سَعِيْرًا أَوْ كَبِيْرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوْقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (البقرة: ٢٨٢)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah diamuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al-Baqarah:282).

Allah Subhanallahu Wa'taala juga berfirman pada surat Al-Anbiyaa ayat 80:

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ (الأنبياء: ٨٠)

Artinya: “Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu; Maka hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah)”. (QS. Al-Anbiyaa : 80).

Dalam surat Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan tentang proses akuntansi. Ayat tersebut menerangkan terkait pencatatan yang dilakukan saat melakukan transaksi khususnya utang-piutang yang bertujuan melindungi hak masing-masing dan menghindari perselisihan. Dalam proses pencatatan tersebut harus dilakukan dengan

benar, jujur dan adil, serta ada saksi dari kedua belah pihak sehingga nantinya tidak terjadi penyelewengan atas pencatatan tersebut. Karena data tersebut akan dipertanggungjawabkan. Ayat tersebut secara umum berkaitan dengan proses Sistem Informasi Akuntansi yang dimana terdiri dari proses pengumpulan, pencatatan, penyimpanan dan pengolahan data untuk menjadi sebuah informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan, yang nantinya harus dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak terkait.

Pada surat Al-Anbiyaa ayat 80 menjelaskan tentang pemanfaatan teknologi. Dalam kitab Tafsir Al-Qurthubi yang ditulis oleh Abu ‘Abdullah Muhammad bin Abu Bakr Al-Anshari al-Qurthubi atau yang lebih dikenal dengan al-Qurthubi, menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan pokok landasan upaya dalam pembuatan alat-alat untuk membantu pekerjaan manusia. Telah di gambarkan oleh Allah *Subhanallahu Wa'taala* tentang Nabi Daud *alaihissalam*, bahwa beliau membuat baju besi untuk melindungi diri dalam peperangan dan lain sebagainya. Atas adanya pemanfaatan teknologi tersebut maka hendaklah selalu bersyukur kepada Allah SWT (Tafsir Kitab Al-Qurthubi jilid 11). Ayat tersebut secara umum berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dalam dalam akuntansi pengelolaan dana desa. Dalam Sistem Akuntansi pengelolaan dana desa merupakan pengembangan dari pemanfaatan teknologi dalam akuntansi guna mengelola dana desa agar menjadi sebuah informasi yang akuntabel, transparan, dan relevan serta mudah dipahami yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder* terkait. Dapat disimpulkan bahwa kedua ayat tersebut saling berkaitan dengan sistem informasi akuntansi pengelolaan dana desa. Pada surat Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan tentang proses akuntansi dan pada surat Al-Anbiyaa ayat 80 menjelaskan tentang pemanfaatan teknologi. Hal tersebut merupakan pengertian dari sistem informasi akuntansi pengelolaan dana desa. Proses akuntansi dan pemanfaatan teknologi dalam sistem harus didasari dengan niat dan tujuan yang baik agar dapat bermanfaat bagi semuanya. Maka dari itu, seorang akuntan harus dapat memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pengolahan data keuangan secara benar dan baik, agar menjadi sebuah informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan yang dimana keputusan tersebut dapat bermanfaat bagi semuanya serta tepat sasaran guna mensejahterakan masyarakat desa.

2.1.5 Religiusitas Perangkat Desa

2.1.5.1 Pengertian Religiusitas Perangkat Desa

Religiusitas dalam agama Islam sebagai bentuk fitrah manusia yang memiliki kecenderungan kepada Tuhan, kecenderungan akan berbuat kebaikan dan kebenaran. Menurut bahasa, *religion* (agama) berasal dari bahasa latin, mengakar pada kata *religio* yang berarti sebuah ikatan antara manusia dengan kekuasaan yang melebihi kekuasaan manusia. Religiusitas adalah seberapa jauh seorang individu meyakini akan keberadaan Tuhan dan ketetapan-Nya, melaksanakan praktik ibadah dan merasakan pengalaman mengenai keberadaan Tuhan serta merasakan kedekatan dengan Tuhan (Emma Meiliza Afifah & Raden Ajeng Retno Kumolohadi, *Jurnal Riset Psikologi*, 2022: 105-108).

Religiusitas Perangkat desa dapat didefinisikan bagaimana seseorang atau perangkat desa dalam memahami, menginternalisasi, dan mengintegrasikan norma-norma yang terdapat dalam agama ke dalam dirinya dan menjadi kepribadiannya, termasuk ke dalam kondisi yang mendorong pola berpikir, perilaku dan tindakan sesuai dengan keyakinannya (Hayati & Amalia, *The Indonesian Accounting Review*, Vol. 11, No. 1, 2021: 105). Definisi religiusitas menurut Glock dan Stark adalah mengacu pada sistem-sistem antara lain sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang terlembagakan, yang berpusat pada persoalan hayati sebagai suatu yang bermakna (*ultimate meaning*), yang kemudian kepercayaan tersebut membimbing seseorang kepada Tuhan. Sikap tersebut dapat berupa perkataan maupun perbuatan. Maka dari itu, religiusitas dapat berarti pemahaman mengenai kepatuhan seseorang terhadap yang yang diajarkan dalam agamanya kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan terhadap Tuhan, orang lain maupun dirinya sendiri (Pitaloka et al. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2, 2022: 804). religiusitas bukan hanya berupa kegiatan beribadatan (*ritual*) kepada Allah *Subhanallahu Wa'taala* semata, namun religiusitas dapat bermakna lebih luas, yaitu pengimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan lainnya yang didorong oleh sikap supranatural yang dimilikinya.

Religiusitas dapat meliputi berbagai dimensi, diantaranya adalah dimensi keyakinan (*ideologi*), dalam dimensi ini setiap agama memiliki kepercayaannya masing-masing yang harus dipertahankan dan ditaati oleh para penganutnya, seperti contoh yakin kepada Allah *Subhanallahu Wa'taala*, keyakinan terhadap adanya rukun iman dan islam. Kemudian dimensi peribadatan atau praktek agama. Dalam dimensi ini dilihat dari sudut pandang peribadatan seseorang, sejauh mana ia patuh dan taat terhadap seluruh perintah

dan larangan dari Allah *Subhanallahu Wa'taala*, seperti contoh sholat, puasa, zakat, menjauhi zina dan minuman keras. Selanjutnya, dimensi pengamalan yaitu sebuah wujud atau bentuk perilaku dalam mengimplementasikan yang dilatarbelakangi oleh ajaran yang dianutnya. Kemudian, dimensi ihsan (penghayatan) yang berkaitan dengan segala sesuatu yang telah Allah *Subhanallahu Wa'taala* berikan serta merasa dekat yang dapat dirasakan dalam hati manusia. Seperti contoh rasa bersyukur kepada Allah *Subhanallahu Wa'taala* dan merasa lega ketika berdoa kepada Sang Pencipta. Dimensi yang terakhir adalah dimensi pengetahuan, yang membahas tentang pengetahuan dan pemahaman terkait ajaran yang dianutnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi sikap religius antara lain, faktor sosial, pengalaman sikap keagamaan, faktor tingkat kebutuhan seseorang dan proses pemikiran non-fisik (Pitaloka et al. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2, 2022: 804).

2.1.5.2 Religiusitas Perangkat Desa dalam Perspektif Islam

Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang dapat dijadikan sebagai dasar konsep religiusitas. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 208 tentang konsep religiusitas yang totalitas dan *rahmatanlil'alamin*. Konsep ini menerangkan tentang Allah *Subhanallahu Wa'taala* meminta kepada umat manusia untuk melaksanakan ajaran islam secara menyeluruh atau totalitas.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

(البقرة: ٢٠٨)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*” (Q.S., Al-Baqarah: 208)

Pada ayat lain juga menerangkan tentang konsep totalitas ini, dalam surat Saba ayat 28 dan surat Al-Anbiyaa ayat 107, bahwa Allah *Subhanallahu Wa'taala* menegaskan bahwa Rasulullah diutus untuk membawa misi yang bersifat *kaffah* atau totalitas yang artinya menyeluruh untuk semua umat manusia dan seluruh alam semesta.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

(سآبآ: ٢٨)

Artinya: “*Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan dari manusia tidak mengetahui.*” (Q.S Saba: 28).

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

(الأنبياء: ١٠٧)

Artinya: “Tidaklah kami mengutus engkau (Muhammad) melaikan sebagai rahmat bagi alam semesta.” (Q.S., Al-Anbiyaa: 107).

Konsep religiusitas yang kedua adalah konsep kesempurnaan (*kamal*). Ajaran yang diajarkan dalam agama Islam bersifat sempurna atau lengkap, mencakup berbagai aspek antara lain aspek kehidupan, sosial, politil ekonomi, hukum, budaya, dan lain sebagainya. Seperti yang terkandung dalam surat Al-Maidah ayat 3:

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

(المائدة: ٣)

Artinya: “ Pada hari itu Aku (Allah) sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Ku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Ku ridhai Islam sebagai agamamu.” (Q.S., Al-Maidah : 3).

Konsep religiusitas yang ke tiga adalah tentang konsep kebajikan, yang dimana konsep ini mencakup hubungan keimanan seseorang kepada Tuhan (vertikal) dan hubungan muamalah antar sesama (horizontal). Seperti yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤَفَّقُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

(البقرة: ١٧٧)

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu bentuk kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah Subhanallahu Wa'taala, hari akhir (kiamat), malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang miskin, musafir, dan peminta-minta serta (memerdekakan) hmba sahaya, mendirikan sholat; dan menunaikan zakat; dan menepati janji apabila berjanji; dan sabar dalam kesempitan, penderitaan dan peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”. (Q.S., Al-Baqarah : 177).

Religiusitas berdasarkan tiga konsep tersebut, ketika individu memiliki religiusitas yang tinggi, maka akan memiliki kesholehan dalam dirinya dan sosial yang tinggi pula. dalam konteks ini, apabila seorang muslim memiliki tingkat religiusitas tinggi akan berusaha untuk menjalankan ajaran agama Islam secara menyeluruh atau totalitas, yang dimana mencakup kedalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam bentuk ritual (ibadah)

maupun hubungan antar sesama atau sosial kemasyarakatan (muamalah). Dengan kata lain, ketika seseorang menjalankan ajaran secara menyeluruh, dia kan senantiasa mematuhi perintah dalam agamanya dan menjauhi apa yang dilarang dalam agamanya, termasuk bersikap jujur pada pengelolaan dana desa .

2.2 Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2. 1 Penelitian Sebelumnya

No.	Penulis	Judul	Tujuan	Metode	Teori	Hasil
1.	“Lala Silvia, Sri Yuni, Oktobria Y. Asi (2023)”	Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Aksesibilitas Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Lawang Uru Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau	eksplorasi ini diharapkan untuk mencari informasi terkait pengaruh dari penyajian laporan pertanggungjawaban, aksesibilitas dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilian pengelolaan dana desa di Desa Lawang Uru Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulau Pisau”	Studi Kuantitatif	Teori Stewardship	Penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas secara signifikan dan positif mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian internal tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penyajian laporan pertanggungjawaban Aksesibilitas dan sistem pengendalian internal tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.
2.	“Siti Pratiwi Husain, Iwan S. Seber, Valentin a Monoarfa (2023)”	“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”	eksplorasi ini diharapkan untuk mencari informasi terkait mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo	Studi Kuantitatif menggunakan teknik regresi linear sederhana	Teori Keagenan	sistem pengendalian internal secara signifikan kearah positif mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3.	Arthur Simanjuntak, Farida	“Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi	eksplorasi ini diharapkan untuk mencari informasi terkait	Studi Kuantitatif menggunakan	-	Kompetensi Aparatur dan pengendalian internal secara

	Sagala, Selvina Dwi Putri (2023)	Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, Transparansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Perkebunan Afdeling 1, Desa Kampung Baru, Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu)	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, Transparansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.	nakan data primer.		signifikan memperkuat pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi dan transparansi tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4.	Sulaiman Ahmad, dan Sapar (2023)	“Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparat, Sistem Keuangan Desa dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Luwu Timur”	eksplorasi ini diharapkan untuk mencari informasi terkait pengaruh partisipasi masyarakat (X1), kompetensi aparat (X2), sistem keuangan desa (X3) dan pengawasan (X4) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y).	Studi Kuantitatif	-	Partisipasi Masyarakat dan siskudes memperkuat pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa namun secara tidak signifikan. Kompetensi Aparat dan Pengawasan secara signifikan memperkuat mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.
5.	Devi Estrilia, Iin Wijayanti, Nurul Hidayah (2023)	“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Penerapan Sistem Akuntansi dan Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa”	eksplorasi ini diharapkan untuk mencari informasi terkait pengaruh kejelasan sasaran anggaran, penerapan sistem akuntansi keuangan, dan kompetensi aparat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan	Studi Kuantitatif menggunakan data primer.	Teori Stewardship.	Kejelasan Sasaran Anggaran, Penerapan Sistem Akuntansi dan Kompetensi Aparatur secara signifikan memperkuat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

			keuangan desa di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.			
6.	Mohammad Ridwan, R. Ery W.A. Santosa, Sulisty Suharto, Anindya P.R.Z. Putri (2023)	“Peran Moderasi Partisipasi Masyarakat Pada Hubungan Kompetensi Pengelola, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”	eksplorasi ini diharapkan untuk mencari informasi terkait pengaruh moderasi partisipasi masyarakat pada hubungan kompetensi pengelola dana desa, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.	Studi Kuantitatif analisis data melalui pendekatan Partial Least Square (PLS),	Teori Agensi	kompetensi pengelolaan dana desa, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat sebagai variabel moderasi memperlemah secara signifikan mempengaruhi antara kompetensi pengelola dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, partisipasi masyarakat sebagai variabel moderasi secara signifikan memperkuat mempengaruhi antara sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
7.	Sella Mahcica Tiarno, Gideon Setyo Budiwitj	“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Dan	eksplorasi ini diharapkan untuk mencari informasi terkait pengaruh kompetensi SDM, sistem	Studi Kuantitatif	Teori Stewardship dan teori Good	kompetensi SDM dan SPIP tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan

	aksono (2023)	Penggunaan Siskeudes Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”	pengendalian intern pemerintah (SPIP), dan penggunaan siskeudes terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kademang, Kabupaten Blitar.		Governance.	dana desa dan penggunaan siskeudes mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.
8.	Sucahyo Herining sih dan Dwi Sudaryati (2019)	“Pengaruh Good Governance Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi”	Bertujuan untuk menguji pengaruh <i>Good Governance</i> dan kompetensi sumber daya manusia terhadap implementasi undang-undang desa mengenai pengelolaan dana desa dengan religiusitas sebagai variabel moderasi.	Studi Kuantitatif (survei cross - sectional)	-	terdapat pengaruh tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>) terhadap implementasi UU Desa, sedangkan variabel kompetensi sumber daya manusia tidak mempengaruhi implementasi UU Desa. Demikian pula, variabel religiusitas tidak mendukung hipotesis sehingga religiusitas bukan variabel moderasi.

2.3 Perumusan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), menjelaskan pengertian Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada kegiatan atau tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh didalam ruang lingkup pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP Nomor 60 Tahun 2008). dalam sistem pengendalian internal pemerintah terdiri dari lima unsur didalamnya, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian internal, informasi dan komunikasi (Budiarto et al. JEMA, 2020: 145-159).

Sistem pengendalian intern pemerintah sangat berperan dalam mengawasi praktik kegiatan di pemerintahan dan memandu kredibilitas terkait keuangan dalam pemerintah sehingga kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat bersifat transparan dan akuntabel, sehingga anggaran tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan bersama secara luas. Hal tersebut selaras dengan teori *stewardship* yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah yang diawasi oleh pimpinan (kepala desa) digunakan untuk memenuhi tujuan organisasi untuk kemaslahatan bersama bukan untuk kemaslahatan individu. Pengendalian internal dilakukan guna memastikan pengelolaan sumber daya yang memadai dan akuntabilitas, serta membantu dalam memastikan pengeluaran anggaran dana desa yang dikeluarkan dan dialokasikan dapat diandalkan, layak dan menjamin bahwa pengeluaran dana desa yang dialokasikan sudah relevan terhadap program dan peraturan yang telah ditentukan. Sistem pengendalian intern pemerintah juga dapat membantu dalam mencegah, mengotorisasi dan mengontrol penggunaan dana desa, sehingga dapat meminimalisir risiko seperti penyelewengan serta penyalahgunaan dana desa serta mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Husain et al (*Jambura Accounting Review Journal homepage*, 2023: 66-76), menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah secara signifikan memiliki pengaruh kearah positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang berarti semakin baik sistem pengendalian intern yang

dijalankan dalam pemerintahan, maka akan semakin baik akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Arthur S et al. (2023), Budiana et al. (2019), Budi Hendaris et al. (2020), Aziz et al. (2015), Adeyemi & Olarewaju (2019), Brenya Bonsu et al. (2022), yang juga menyatakan SPIP secara signifikan kearah positif mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan penjelasan tersebut, sehingga disimpulkan asumsi hipotesis sebagai berikut:

H1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.3.2 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Abdelraheem et al. (2021: 191-196) sistem informasi akuntansi merupakan kerangka kerja yang dipergunakan untuk mencatat, mengumpulkan, menyimpan dan mengolah data untuk pengambilan keputusan. Informasi yang diberikan berupa informasi dalam hal keuangan yang berkaitan dengan lembaga tertentu. Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang dijalankan oleh sumber daya manusia dan dilengkapi dengan peralatan khusus yang menyediakan data proses akuntansi (mencatat, mengumpulkan, menyimpan dan mengolah) yang bertujuan dalam pengambilan keputusan terkait keuangan. Melaksanakan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan dana desa dapat membantu pemerintah desa dalam mengamati data yang berkaitan dengan dana desa, sehingga dapat mempermudah penyusunan informasi dan mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pengelolaan informasi. Dengan tujuan agar laporan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan secara akurat, tepat serta akuntabel.

Sistem informasi akuntansi pengelolaan dana desa dapat mempermudah pemerintah desa untuk memproses dan menyajikan informasi serta dapat mempresentasikan kegiatan yang dilakukan ke daerah dengan lebih efektif dan cepat. Data yang didapat juga lebih tepat sehingga cenderung dijadikan alasan untuk mengambil keputusan penting yang bisa bermanfaat bagi bantuan pemerintah kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori *stewardship* yang menyatakan bahwa penggunaan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan dana desa akan mempermudah aparatur desa dalam mengelola data dana desa, sehingga perangkat desa lebih mudah dalam menyajikan laporan pertanggungjawaban dari pengelolaan dana desa guna menciptakan akuntabilitas dan transparansi. Dana desa yang digunakan tersebut tepat sasaran yang untuk tujuan organisasi yaitu memenuhi kepentingan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemanfaatan SIA

mempunyai tujuan utama untuk mendukung dinamika yang baik dalam organisasi, dengan memberikan informasi yang terorganisir dan terkoordinasi. sehingga manajemen dapat mengambil keputusan yang tepat dan baik, sejalan dengan tujuan organisasi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Estrilia et al. (*Jurnal Akuntansi dan Manajemen, 2023: 01-11*) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi mempengaruhi secara signifikan ke arah positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang menunjukkan bahwa semakin baik pemanfaatan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan dana desa maka akan semakin meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat didapat hipotesis sebagai berikut:

H2. Sistem Informasi Akuntansi Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.3.3 Pengaruh Religiusitas Perangkat desa dalam Memoderasi Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Sistem pengendalian intern merupakan sebuah proses yang bersifat integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh pemimpin dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui berbagai kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi sistem pengendalian intern pemerintah adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh pada ruang lingkup pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah (PP Nomor 60 Tahun 2008). Oleh karena itu, yang melaksanakan SPIP adalah seluruh aparatur desa termasuk pemimpin desa (lurah atau kepala desa). Religiusitas stakeholder dapat mendorong aparatur dalam lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sehingga sistem pengendalian intern yang berlaku dapat berjalan dengan baik dengan adanya perangkat desa yang patuh terhadap peraturan.

Sistem pengendalian internal pemerintah yang baik akan memberdayakan terciptanya administrasi yang baik, misalnya keterusterangan dan tanggung jawab dalam laporan keuangan untuk mengawasi dana desa. Hal ini sesuai dengan penggunaan teori *stewardship* yang menyatakan bahwa SPIP akan mendukung pertanggungjawaban dan transparansi dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa, khususnya dalam mengawasi pengelolaan dana desa untuk tujuan bersama yaitu mewujudkan kemaslahatan masyarakat desa. Religiusitas perangkat desa berperan dalam melengkapi dan mempertahankan sistem

pengendalian intern pemerintah yang dijalankan. Dengan religiusitas perangkat desa yang tinggi akan membuat pengendalian intern dapat berjalan dengan baik. Perangkat desa yang berreligiusitas tinggi akan termotivasi untuk berusaha patuh dan taat terhadap peraturan yang berlaku. Sehingga akan berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan yang semakin efektif dan efisien, serta dapat menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Riri S. (2023) menjelaskan bahwa religiusitas mempengaruhi tingkat kesadaran individu untuk memenuhi kewajibannya. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa tingkat pemahaman agama yang dianut setiap individu dalam kehidupan sehari-hari memiliki komitmen dalam memenuhi kewajibannya termasuk mematuhi terhadap peraturan sistem pengendalian intern yang berlaku. Menurut Handayani et al. (2021) menjelaskan bahwa religiusitas merupakan keyakinan yang dimiliki oleh setiap individu akan adanya Tuhan, yang berdampak individu tersebut akan takut untuk melanggar peraturan yang berlaku. Sehingga perangkat desa yang memiliki religiusitas tinggi berkomitmen dan patuh untuk terhadap ajaran agama akan berusaha berbuat kebaikan. Perbuatan baik perangkat desa adalah memiliki kesadaran dan ikut berpartisipasi, patuh dan taat dalam setiap peraturan dan kegiatan desa termasuk pengelolaan dana desa, sehingga pengelolaan keuangan desa akan membuat kesejahteraan bagi kesemua pihak dan dapat mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan penjelasan berikut dapat disimpulkan hipotesis berikut ini:

H3. Religiusitas Perangkat Desa Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

2.3.4 Pengaruh Religiusitas Perangkat desa dalam Memperkuat Variabel Sistem Informasi Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Menurut Nugroho Widjajanto menjelaskan bahwa catatan, formulir, peralatan dan perlengkapan seperti komputer dan peralatan lainnya, sumber daya manusia, dan laporan yang dihubungkan membentuk suatu sistem informasi akuntansi. SIA adalah sistem yang bertujuan guna mengumpulkan informasi, mencatat, menyimpan, dan mengolah informasi untuk menyediakan informasi dalam pengambilan keputusan (Abdelraheem et al. 2021: 191-196). Sistem informasi akuntansi di jalankan oleh manusia dengan bantuan teknologi. Perangkat desa bertugas mengelola dana desa dalam sistem informasi akuntansi dengan tujuan memberikan hasil yang sebaik-baiknya. Hal ini dapat dipenuhi dengan harapan bahwa perangkat desa dapat memanfaatkan inovasi yang digunakan secara maksimal. Apabila seorang perangkat desa mempunyai agama yang tinggi dan didukung oleh aparatur

yang berkompeten dan mampu menjalankan sistem informasi akuntansi pengelolaan dana desa, maka akan mendorong orang lain untuk tidak melakukan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Religiusitas dapat meningkatkan kapasitas aparat desa dalam segala kemampuan yang dimilikinya.

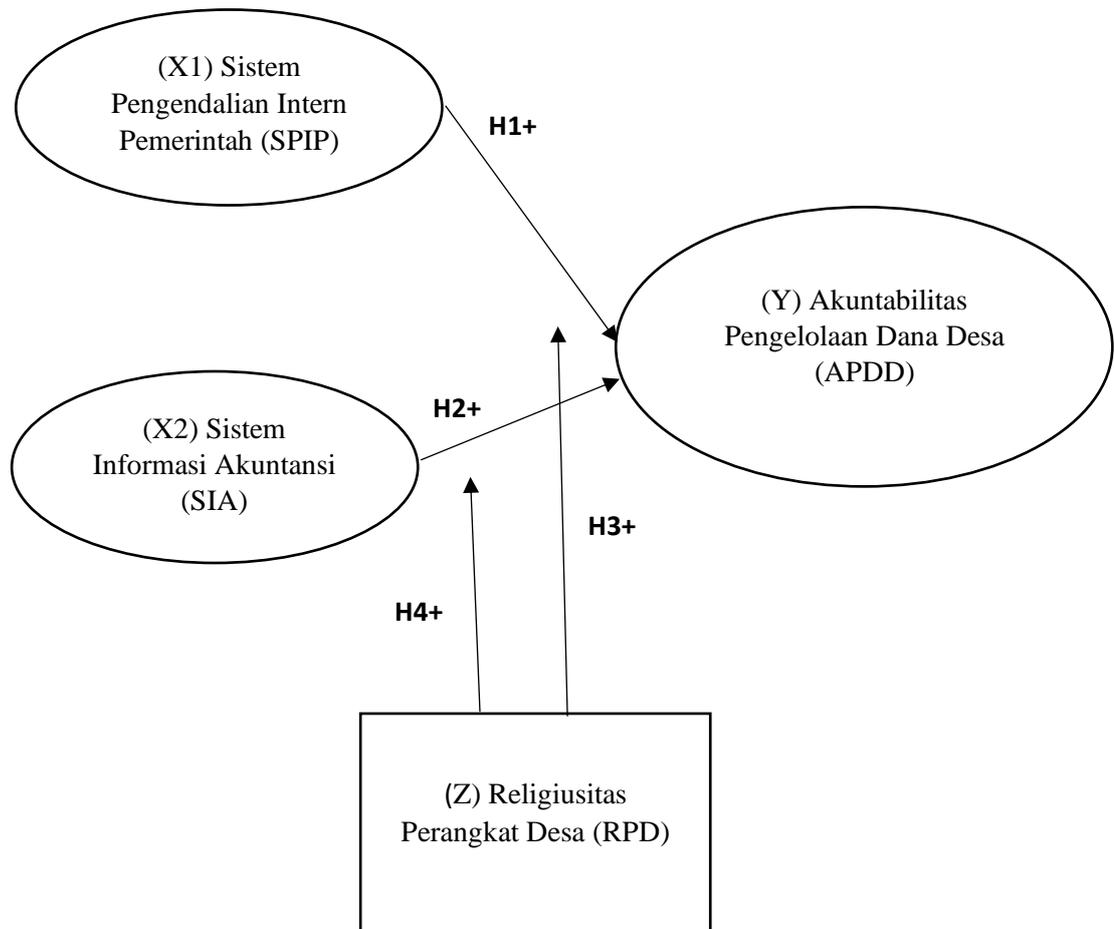
Pemanfaatan SIA yang baik dapat menghasilkan data berkualitas yang bernilai guna. Semakin banyak data yang disampaikan, semakin banyak pilihan yang diambil, yang tentunya akan membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat, yang dapat memberikan kesejahteraan bagi semua pihak, khususnya masyarakat. Hal ini selaras dengan teori *stewardship* yang dimana pemerintah desa berusaha mewujudkan tujuan organisasi untuk kesejahteraan masyarakat desa yang baik dengan penggunaan sistem informasi akuntansi. Dengan sikap religiusitas yang tinggi pada aparatur pengelolaan dana desa, akan mendorong pengelolaan informasi akuntansi menjadi lebih baik dan meminimalisir tindak kecurangan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Sehingga penggunaan dana desa dapat dialokasikan dengan tepat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa serta pemangku kepentingan lainnya.

Seperti yang dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Nursin et al., 2022), menyatakan bahwa religiusitas dapat memperkuat pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan sikap religiusitas yang tinggi akan membuat seseorang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi pula, yang berdampak pada pengoptimalan kemampuannya dalam menggunakan teknologi informasi termasuk sistem informasi akuntansi sehingga memungkinkan aparatur menghasilkan pengelolaan dana desa yang lugas dan bertanggungjawab, dan akan membuat data lebih relevan dan efektif. Memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk sistem informasi akuntansi pengelolaan dana desa dapat meningkatkan dan mempercepat proses transaksi serta pengolahan lainnya. didukung dengan sikap religiusitas yang tinggi yang dimiliki oleh aparatur desa, hal tersebut akan memotivasi aparatur pengelolaan dana desa dalam menggunakan sistem informasi akuntansi sebagai alat yang mempermudah serta memaksimalkan pekerjaan dalam pengelola keuangan dana desa. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H4. Religiusitas Perangkat Desa Memoderasi Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

2.4 Kerangka Berpikir Penelitian

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis metode yang didasarkan pada pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017) Metodologi kuantitatif merupakan strategi pendekatan pemeriksaan berdasarkan pola pikir positivisme, digunakan untuk berkonsentrasi pada populasi dan tes tertentu, yang biasanya melibatkan pemeriksaan berkala untuk prosedur pemeriksaan, pengumpulan informasi dengan menggunakan instrumen penelitian, dan pemeriksaan informasi. bersifat kuantitatif/faktual yang sepenuhnya bermaksud menguji spekulasi. yang telah ditetapkan.

Objek pada penelitian ini adalah Desa di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Sedangkan subjek dari penelitian ini adalah perangkat desa di Kecamatan Sayung dan Mranggen Kabupaten Demak. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan data primer yang diambil secara langsung dari responden. Stategi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kuesioner yang diperoleh dengan cara mengajukan daftar pernyataan kepada perangkat desa di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang mendapatkan dana desa.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang akan dibahas. Merupakan sekumpulan atau bermacam-macam kompeten, unsur-unsur atau satuan-satuan dalam suatu ruang lingkup atau kawasan dan pokok bahasan dengan ciri-ciri dan kualitas tertentu yang telah ditentukan peneliti untuk dibahas dan disimpulkan hasil penelitiannya. Karakteristik atas suatu objek atau subjek yang akan diteliti sesuai dengan perkiraan dari penelitian. Menurut Hadari Nawawi. (1983), mendefinisikan “populasi sebagai objek penelitian yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan dan tumbuhan, serta benda, peristiwa, dan gejala yang menunjukkan ciri-ciri tertentu dalam menelitian yang dilakukan”. Sehingga, populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan objek yang akan dikaji dalam penelitian yang memiliki karakteristik tertentu seperti orang, benda, ataupun peristiwa yang memiliki ciri tertentu. Populasi yang diambil pada penelitian ini yaitu desa yang berada di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang mendapatkan dana desa yang berjumlah 49 desa.

3.2.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2017) mendefinisikan “sampel sebagai bagian dari populasi yang menjadi sumber data penelitian, yang dimana sampel hanyalah sebagian kecil dari sifat sifat umum yang ada pada populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel adalah teknik untuk menentukan sampel mana akan digunakan pada penelitian yang mewakili populasi”.

Sampel merupakan bagian atau yang dapat mewakili dari keseluruhan populasi. Sampel ini bisa didapatkan dari pengukuran statistik. Sampel dari penelitian ini merupakan perangkat desa di Kecamatan sayung dan Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin/rumus Yamane (1973):

$$n=N/(1 + Nd^2)$$

Dimana:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

d² = Presisi yang ditetapkan 0,1 (10%)

Maka dapat dirumuskan dan ditetapkan bahwa jumlah sampel yang harus diambil sebagai responden adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}n &= N/(1 + Nd^2) \\ &= 49/(1 + 49(0,1^2)) \\ &= 49/(1 + 49(0,01)) \\ &= 49/1,49 \\ &= 32,8\end{aligned}$$

Oleh karena itu, Jumlah minimal sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini sebanyak 33 responden.

Kriteria sampel yang digunakan daam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aparatur pemerintahan desa, terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala seksi pemerintahan dan lain sebagainya.,
2. Minimal pendidikan SLTA/ sederajat.,
3. Memiliki masa kerja minimal 1 tahun.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan informasi digunakan untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian. Sebelum melakukan penelitian secara langsung, para ahli pada umumnya memiliki beberapa asumsi sehubungan dengan teori dan bukti pendukung yang mereka gunakan yang biasa disebut hipotesis. Untuk mendemonstrasikan teori ini secara observasi, analis harus mengumpulkan informasi atau data untuk pengujian tambahan. Keanekaragaman informasi tidak sepenuhnya ditentukan oleh faktor-faktor hipotesis. pengumpulan data informasi bergantung pada model tertentu.

Data digunakan dalam penelitian ini berupa data primer, secara khusus data yang diperoleh melalui pengumpulan data secara langsung untuk memecahkan suatu masalah pada subjek penelitian. Untuk mempermudah responden dalam menjawab kuesioner, peneliti menggunakan metode kuesioner dimana mereka mengkomunikasikan pernyataan kepada responden beserta solusi yang efektif. Penelitian ini mengambil responden dari perangkat desa di Kecamatan Sayung dan Mranggen, Kabupaten Demak yang memiliki pemahaman terkait dana desa dan memenuhi kriteria yang ditentukan. Kuesioner ini dilakukan secara langsung untuk mengumpulkan data yang kemudian data tersebut di uji dengan menggunakan program computer excel dan bantuan *Software WarpPLS 7.0*

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.4.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 jenis yaitu variabel dependen (terkait), variabel independen (bebas) dan variabel moderasi. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Variabel dependen adalah variabel yang terikat oleh variabel lainnya yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (APDD).
- 2) Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi dan menjadi sebab terjadinya variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Sistem Informasi Akuntansi (SIA).
- 3) Variabel moderasi adalah variabel yang mempengaruhi dalam artian memperkuat atau memperl lemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, dan juga disebut dengan variabel independen kedua. Variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Religiusitas Perangkat Desa (RPD)

3.4.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional dari masing-masing variabel penelitian yang telah diidentifikasi dapat dinyatakan sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa	<p>“Suatu kewajiban dalam menyampaikan pertanggung jawaban atas dasar hubungan tindakan, kinerja, keputusane seseorang atau sebuah organisasi dalam arti pemerintah, kepada pihak yang berhak menerima pertanggung jawaban tersebut yaitu masyarakat dalam mengelola sumber-sumber daya desa” (Indraswari & Rahayu, 2021).</p>	<p>Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Tika Rismawati (2019), dengan indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kejujuran dan keterbukaan informasi 2. Kepatuhan pelaporan 3. Kesesuaian prosedur 4. Kecukupan informasi 5. Ketepatan penyampaian laporan <p>“Diukur dengan skala <i>likert</i> 5 poin, skala 1 = sangat tidak setuju sampai skala 5”</p>
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	<p>“Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang bersifat efektif, efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku” (PP Nomor 60 Tahun 2008).</p>	<p>Indikator yang dipergunakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian risiko 3. Kegiatan pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan (COSO dan PP No. 60 Tahun 2008) <p>“Diukur dengan skala <i>likert</i> 5 poin, skala 1 = sangat tidak setuju sampai skala 5”</p>

Sistem Informasi Akuntansi	<p>“Sistem Informasi Akuntansi adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data guna menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan” (Abdelraheem et al., 2021).</p>	<p>Menggunakan indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan SAP 2. Pencatatan transaksi 3. Pembuatan laporan keuangan <p>“Diukur dengan skala <i>likert</i> 5 poin, skala 1 = sangat tidak setuju sampai skala 5”</p>
Religiusitas Perangkat Desa	<p>“Religiusitas perangkat desa dapat didefinisikan bagaimana seseorang atau perangkat desa dalam memahami, menginternalisasi, dan mengintegrasikan norma-norma yang terdapat dalam agama ke dalam dirinya dan menjadi kepribadiannya, termasuk ke dalam kondisi yang mendorong pola berpikir, perilaku dan tindakan sesuai dengan keyakinannya” (Hayati & Amalia, 2021)</p>	<p>Indikator yang dipergunakan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keyakinan 2. Praktik agama 3. Pengalaman spiritual 4. Pengetahuan <p>Diukur dengan skala “<i>likert</i> 5 poin, skala 1 = sangat tidak setuju sampai skala 5”</p>

Skala Likert adalah jenis skala yang digunakan untuk menentukan atau mengukur informasi subjektif atau kuantitatif. Informasi ini diperoleh untuk menentukan cara pandang, wawasan atau watak seseorang terhadap suatu keanehan yang terjadi. Eksplorasi ini menggunakan instrumen skala likers. Kemudian akan diberikan alternatif tanggapan terhadap pernyataan-pernyataan seperti STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), N (Netral), S (Setuju), dan SS (Sangat Setuju) dengan nilai 1 sampai 5.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis multivariat, yaitu persamaan *Structural Equating Modeling (SEM)* dengan menggunakan program WarpPLS 7.0.

3.5.1 Analisis Structural Equating Modeling (SEM) – Partial Least Square (PLS)

Menurut Hamid Rahmad S, dan Anwar S, (2019) menjelaskan persamaan *Structural Equation Modeling (SEM)* sebagai sebuah teknik statistik yang digunakan untuk menguji dan memperkirakan hubungan sebab atau akibat melalui kombinasi data statistik. Model penelitian SEM dikelompokkan menjadi dua pendekatan yaitu *Covariance Based SEM* dan *Variance Based SEM* atau *Partial Least Square (PLS)*. Persamaan SEM memiliki karakteristik sebagai suatu teknik analisis yang lebih menegaskan pada menerangkan. Disederhanakan, persamaan SEM mengestimasi sekumpulan dalam persamaan regresi berganda yang mempunyai hubungan ketergantungan melalui model yang di aplikasi dengan program statistik (Noor, 2014).

Pendekatan statistik multivariat yang disebut analisis *Partial Least Square (PLS)* digunakan untuk membandingkan beberapa variabel independen dan dependen. Selain itu, PLS dimaksudkan sebagai teknik statistik SEM berbasis varian yang melakukan regresi berganda jika terjadi masalah tertentu pada data, seperti terdapat data yang hilang dan multikolinearitas ketika sampel penelitian kecil (Hamid Rahmad S, dan Anwar S, 2019)

3.5.2 SEM-PLS dengan Efek Moderasi

Hubungan antara variabel bebas dan terikat dievaluasi menggunakan Uji Interaksi *Moderated Regression Analysis (MRA)* apabila terdapat variabel moderasi (variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan). Pengujian MRA dilakukan dengan menukarkan paling sedikit dua variabel bebas. Jika hasil dari penggantian kedua variabel bebas tersebut signifikan, maka variabel tersebut menunjukkan memoderasi hubungan antara variabel bebas dan variabel dependennya. Hal ini akan mengakibatkan hubungan nonlinier yang berarti sering terjadi kesalahan dalam pengukuran koefisien MRA. Oleh karena itu, tindakan terbaik adalah mencoba menggunakan model persamaan struktural SEM, yang pada akhirnya akan memungkinkan kita memasukkan efek interaksi ke dalam model dan menyesuaikan kesalahan pengukuran (Ghozali, 2014).

3.5.3 Analisis Jalur

Menurut Noor, (2014) menjelaskan analisis jalur sebagai suatu metode yang digunakan untuk menguji keterkaitan yang terjalin antar variabel independen yang berdampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap variabel dependen. Analisis ini adalah

perpanjangan dari regresi berganda. Model yang menggambarkan hubungan sebab akibat antara variabel saat ini atau kajian hipotesis tertentu dianalisis dalam analisis jalur. Pada penelitian ini menggunakan analisis jalur (*path analysis*) dan pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program WarpPLS 7.0 untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui hasil hipotesis pada WarpPLS 7.0 ini dapat melihat pada bagian *view path coefficient* dan *P-value*. Sedangkan untuk melihat hasil dari pengujian moderasi dapat dilihat melalui *P-value* sesuai dengan model moderasi yang dibangun pada penelitian (Sholihin et al., 2021).

3.5.4 Evaluasi Model

Dalam *Partial Least Square (PLS)* evaluasi model menggunakan metode pengukuran dan evaluasi struktural. Menggunakan model pengukuran (*outer model*) digunakan dalam menguji reliabilitas dan validitas dari masing-masing indikator yang membentuk konstruksi laten. Penggunaan evaluasi model (*inner model*) bertujuan untuk memprediksi hubungan antara variabel laten dengan melihat seberapa besar varian yang dapat dijelaskan untuk mengetahui tingkatan signifikansinya dari *P-value* (Ghozali, 2014).

Penilaian model *Partial Least Square (PLS)* berdasarkan pada pengukuran prediksi yang memiliki sifat non-parametrik. Model struktural atau inner model dinilai dengan melihat presentase variance dengan menggunakan R-square untuk konstruk observasi terikat dengan interpretasi yang sama dengan regresi, dan uji t statistik yang diperoleh melalui sistem bootstrapping, dengan tingkat signifikansi dari setiap koefisien parameter jalur struktural (Jogiyanto dan Abdillah, 2014). Pengujian validitas ini dilakukan untuk menguji apakah item pernyataan yang terdapat dalam kuesioner valid atau tidak. Apabila pertanyaan-pertanyaan pada suatu kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut, maka kuesioner tersebut dikatakan valid.

3.5.4.1 Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Model pengukuran (Outer Model) merupakan sebuah model yang menghubungkan variabel laten dengan variabel manifes. Variabel laten adalah merupakan variabel yang tidak dapat diperhatikan secara langsung dan memerlukan faktor manifes yang ditetapkan sebagai indikator untuk diuji. Sedangkan variabel manifes merupakan variabel atau faktor yang dapat dilihat langsung secara langsung. Pengukuran outer model digunakan sebagai penentu spesifikasi hubungan antara variabel laten dengan indikatornya. Dalam SEM-PLS ada tiga kriteria dalam menilai outer model yaitu dengan Convergent Validity, Discriminant Validity dan Composite Reliability (Sholihin et al., 2021).

1) *Convergent Validity*

Pengujian ini digunakan untuk melihat indikator yang berkorelasi positif dengan pengukur atau indikator alternatif untuk konstruk yang sama. *Convergent Validity* dari model pengukuran dengan refleksi indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item skor/komponen skor yang dihitung dengan PLS. Ukuran refleksi individual dapat dikatakan tinggi jika korelasi >0.7 dengan variabel yang diukur. Namun untuk tahap penelitian awal dari pengembangan skala pengukuran nilai *loading Factor* 0.6 – 0.7 dianggap cukup memadai, Kemudian melihat nilai *Average Variance Extracted* (EVA) dan dibandingkan dengan *Rule Of Thumb* ($>0,50$).

2) *Discriminan Validity*

Pengukuran ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar variabel laten atau konstruk memiliki perbedaan dengan variabel lain sebagaimana yang dilihat dari hasil penelitian empiris. *Discriminant Validity* dari model pengukuran dengan refleksi indikator dinilai berdasarkan *Cross Loading* dan *Fornell-Larckel Criterion*. Pendekatan yang pertama digunakan dalam menilai validitas diskriminan indikator adalah dengan menggunakan *Cross Loading*. Mengukur validitas diskriminan dengan indikator reflektif dengan melihat nilai *Cross Loading* disetiap variabelnya > 70 . *Fornell-Larckel Criterion* membandingkan AVE dengan korelasi antar variabel laten. Sebuah model dianggap memiliki validitas diskriminan yang memadai jika akar AVE untuk setiap konstruk lebih besar daripada korelasi antar konstruk dengan konstruk lainnya dalam model (Hamid R dan Anwar S, 2019).

3) *Composite Reliability*

Pengukuran ini bertujuan untuk mengukur konstruk dengan indikator reflektif yang dapat dilakukan menggunakan *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*. Dalam pengukuran *internal consistency* penggunaan *Composite Reliability* lebih baik dibandingkan dengan *Cronbach's Alpha* karena tidak mengansumsikan titik awal yang sama untuk setiap indikator. Pengukuran menggunakan *Cronbach's Alpha* cenderung untuk menilai lebih rendah sehingga lebih disarankan untuk digunakan. Pengujian menggunakan *Composite Reliability* dengan nilai batas ($\geq 0,7$) dan dapat diperkuat dengan nilai cronbach alpha apabila memiliki nilai $> 0,6$ (Ghozali, 2014).

3.5.4.2 Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Inner model digunakan untuk menentukan spesifikasi hubungan antara variabel laten satu dengan variabel laten lainnya. Pada pengujian ini meliputi koefisien determinan (*R-Square*), relevansi prediksi (*Q-Square*), ukuran efek (*F-Square*), dan uji kecocokan model (*Goodness of Fit Model*).

1) Koefisien Determinan (*R-Square*)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel dependen dalam sebuah penelitian. Suatu variabel dapat dikatakan sebagai predictive power terhadap tingkat substansinya atau memiliki pengaruh yang kuat antar variabel apabila nilai (*R-Square*) sebesar 0,75, dan sebuah variabel dikatakan lemah atau tidak memiliki pengaruh yang kuat apabila nilai (*R-Square*) sebesar 0,50 (Sholihin et al., 2021)

2) Relevansi Prediksi (*Q-Square*)

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui seberapa baik observasi yang dilakukan sehingga dapat memberikan hasil terhadap prediksi. Apabila nilai *Q-Square* senilai 0,02 maka dapat dikatakan bahwa antar variabel memiliki prediksi yang kecil, jika nilai *Q-Square* senilai 0,15 maka dapat dikatakan bahwa antar variabel memiliki prediksi yang sedang, sedangkan jika nilai *Q-Square* 0,35 maka dapat dikatakan bahwa antar variabel memiliki nilai prediksi yang besar (Sholihin et al., 2021).

3) Ukuran Efek (*F-Square*)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui ukuran tingkatan dalam penelitian. *F-Square* memiliki tiga kategori, yaitu kecil jika nilai sebesar (0,02), sedang jika nilai sebesar (0,15), dan besar jika senilai (0,35). Evaluasi ini juga perlu dilakukan pada tahap evaluasi model struktural (Sholihin et al., 2021).

4) Kecocokan Model (*Model Fit*)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah suatu model memiliki kecocokan dengan data. Pada pengujian kecocokan model terdapat tiga indeks pengujian yaitu *Average Path Coefficient* (APC), *Average R-squared* (ARS) dan *Average Varians Factor* (AVIF). Pengukuran model fit dapat dilihat dari nilai P-value dari APC dan ARS harus lebih kecil dari 0,05 ($< 0,05$), nilai AVIF harus kurang dari 5 (< 5), nilai *Tenenhaus GoF* $\geq 0,10$, $\geq 0,25$ dan $\geq 0,36$ (kecil, sedang dan besar) (Ghozali dan Latan, 2014).

3.5.5 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi yang merupakan suatu teknik untuk membangun persamaan dan menggunakannya untuk membuat prediksi. Persamaan regresi merupakan persamaan matematis yang mendefinikan hubungan antara dua variabel (Suliyanto, 2006).

Dalam pengujian evaluasi model struktural dilakukan dengan melihat nilai signifikan *P-value* untuk mengetahui pengaruh antar variabel berdasarkan hipotesis yang dibangun. Arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dapat dijelaskan menggunakan pengujian hipotesis. Uji ini dilakukan dengan menganalisis jalur (*path coefficient*) atas model yang telah dibuat. Nilai signifikan yang digunakan adalah nilai *P-value* 0,10 (signifikan 10%), 0,05 (signifikan 5%), dan 0,01 (signifikan 1%). Pada penelitian ini menggunakan signifikan *P-value* 0,05 (5%) yang dapat disimpulkan jika:

$p\text{-value} > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak

$p\text{-value} < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1.1 Kondisi Geografis dan Demografis Kecamatan Sayung

Kecamatan Sayung merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Demak. Kecamatan Sayung sendiri memiliki luas wilayah sebesar 78,80 km² atau sekitar 8,77 persen dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Demak. Kecamatan Sayung ini terletak antara 140° 60′-140° 80′ Bujur Timur dan 7°70′-8° 40′ Lintang Selatan dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Karangtengah di bagian timur, bagian utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa, wilayah bagian barat berbatasan langsung dengan Kota Semarang, sedangkan wilayah bagian selatan berbatasan langsung dengan wilayah Kecamatan Mranggen (BPS Kabupaten Demak, 2022).

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, pada tahun 2021 jumlah penduduk Kecamatan Sayung sebanyak 105.525 jiwa, dengan rincian sebanyak 52.028 penduduk perempuan dan 53.497 penduduk laki-laki. Penduduk wilayah Kecamatan Sayung mayoritas bekerja sebagai petani, sehingga wilayah ini merupakan daerah agraris.

Kecamatan Sayung secara wilayah administratif terdiri dari 20 desa, dengan 101 dusun, 106 Rukun Warga (RW) dan 501 Rukun Tetangga (RT). Berdasarkan administrasi jumlah perangkat desa yang dimiliki oleh Kecamatan Sayung adalah sebanyak 260 orang yang terdiri dari, Kepala Desa yang berjumlah 20 orang, sekretaris Desa berjumlah 17 orang, Kepala Dusun dengan total 77 orang, Kepala Urusan berjumlah 78 Orang, dan pembantu kaur berjumlah 68 orang (BPS Kabupaten Demak, 2022).

4.1.1.2 Kondisi Geografis dan Demografis Kecamatan Mranggen

Kecamatan Mranggen merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Demak dan perbatasan langsung dengan Kecamatan Sayung. Secara administrasi luas wilayah Mranggen seluas 72,22 km², yang terdiri dari 19 desa. Penduduk Kecamatan Mranggen mayoritas bekerja sebagai petani. Luas lahan sawah di Kecamatan Mranggen mencapai 1,307,70 ha, dan sisanya merupakan lahan kering (BPS Kabupaten Demak, 2023).

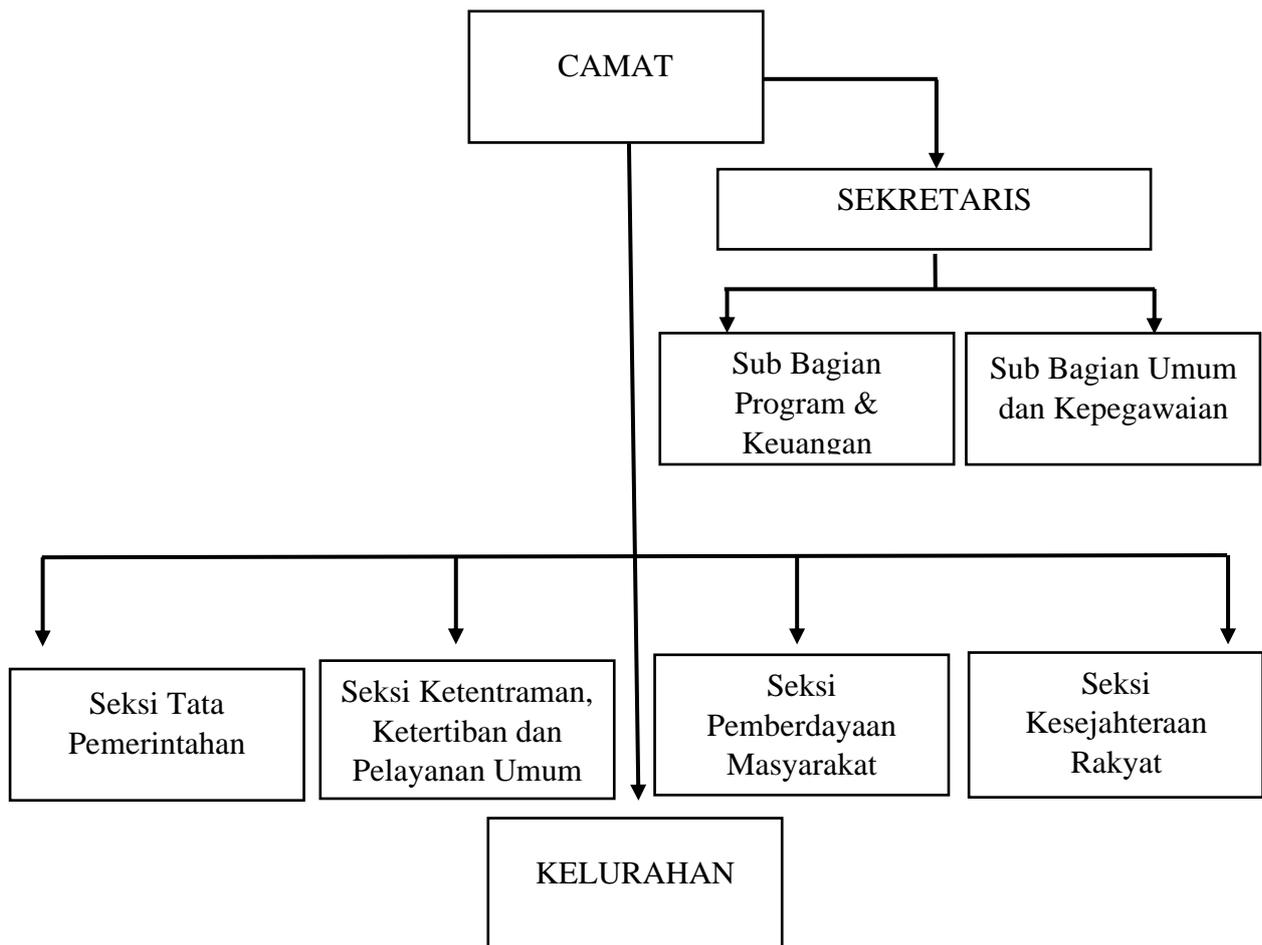
Tercatat tahun 2022 jumlah penduduk Kecamatan Mranggen sebanyak 169.503 orang dengan kepadatan penduduk mencapai 2.347 jiwa per km². Terdiri dari 84.891

laki-laki dan 84.612 perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 100,33. Wilayah administratif Kecamatan Mranggen terdiri dari 19 desa dengan 163 Rukun Warga (RW) dan 1.198 Rukun Tetangga (RT). keseluruhan desa sudah terisi Kepala Desa dan terdapat Badan Musyawarah Desa. Sedangkan untuk sektreris desa hanya terisi pada 16 Desa. (BPS Kabupaten Demak, 2023).

4.1.1.3 Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Sayung dan Kecamatan Mranggen

Berdasarkan pada Peraturan Bupati (PERBUP) Demak Nomor 61 Tahun 2016 menjelaskan struktur organisasi pemerintahan Kecamatan Sayung dan Kecamatan Mranggen adalah sebagai berikut:

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Sayung dan Mranggen



Sumber : BPS Kabupaten Demak 2023

4.1.2 Deskriptif Data Penelitian

Dalam penelitian ini memperoleh data dengan melakukan penyebaran kuesioner. Pendistribusian kuesioner dilakukan secara langsung kepada responden yang memenuhi kriteria, yaitu Aparatur pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala seksi pemerintahan dan lain sebagainya, memiliki masa kerja minimal 1 tahun di seluruh desa yang berada di Kecamatan Sayung dan sebagian Kecamatan Mranggen dengan total 33 Desa. Dengan masing-masing desa diambil 1 responden, sehingga total kuesioner yang dibagikan kepada responden sebanyak 33 eksemplar dengan total data yang kembali dan bisa diolah hanya sebanyak 33 eksemplar. Penyebaran kuesioner ini dilakukan mulai tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan 19 Maret 2024.

4.1.3 Karakteristik Responden

Karakteristik responden merupakan data atau informasi yang diperoleh dari responden melalui kuesioner yang didistribusikan oleh penulis, yang meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, jabatan dan masa jabatan.

4.1.3.1 Jenis Kelamin

Mengingat jumlah responden penelitian ini, kuantitas laki-laki dan perempuan sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Jumlah laki laki	30	90,9%
2	Jumlah perempuan	3	9,1%
JUMLAH		33	100%

Sumber: Data Primer

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa jumlah responden terbanyak didominasi oleh laki-laki sebanyak 30 orang dengan persentase 90,9%, sedangkan untuk responden perempuan berjumlah 3 orang dengan persentase 9,1%. Maka dapat disimpulkan bahwa perangkat desa di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Mranggen di dominasi oleh pegawai laki-laki.

4.1.3.2 Pendidikan Terakhir

Berdasarkan keseluruhan data pada penelitian ini, jumlah responden berdasarkan pendidikan terakhirnya sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
1	SLTA	20	60,6%
2	D3	2	6,1%
3	S1	8	24,2%
4	S2	3	9,1%
JUMLAH		33	100,0%

Sumber: Data Primer

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa responden dengan tingkat pendidikan terakhirnya SLTA/SMA berjumlah 20 responden dengan persentase 60,6%, untuk D3 berjumlah 2 responden dengan persentase 6,1%, untuk S1 berjumlah 8 responden dengan persentase 24,2% dan untuk S2 berjumlah 3 responden dengan persentase 9,1%. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden lulusan SLTA/SMA.

4.1.3.3 Usia Responden

Berdasarkan keseluruhan data yang didapat dari 33 responden dengan jumlah persentase usia sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Responden

No.	Usia Responden	Jumlah	Persentase
1	17-30	2	6,1%
2	31-40	5	15,2%
3	41-50	15	45,5%
4	51-60	10	30,3%
5	>60	1	3,0%
JUMLAH		33	100,0%

Sumber: Data Primer

Dari tabel 4.3 mengenai data persentase usia responden diatas, dapat disimpulkan bahwa responden dengan usia mulai dari 17 – 30 tahun sebanyak 2 responden dengan persentase 6,1%. Untuk usia 31 – 40 tahun sebanyak 5 responden dengan persentase 15,2%. Untuk usia 41 – 50 tahun sebanyak 15 responden dengan persentase 45,5%. Untuk usia responden 51 – 60 tahun sebanyak 10 responden dengan persentase 30,3%. Untuk usia responden lebih dari 60 tahun berjumlah 1 responden dengan persentase 3,0%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas usia responden di kisaran 41 – 50 tahun.

4.1.3.4 Lama Menjabat

Berdasarkan keseluruhan data yang didapat, persentase perangkat desa dengan lama menjabat sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjabat

No.	Lama Menjabat	Jumlah	Persentase
1	1-5	11	33,3%
2	6-10	8	24,2%
3	11-15	5	15,2%
4	16-20	0	0,0%
5	>20	9	27,3%
JUMLAH		33	100,0%

Sumber: Data Primer

Dari hasil data tabel 4.4 diatas mengenai karakteristik responden berdasarkan lam menjabatnya, dapat disimpulkan bahwa lama menjabat responden mulai dari 1 - 5 tahun sebanyak 11 responden dengan persentase 33,3%, untuk 6 – 10 tahun sebanyak 8 responden dengan persentase 24,2%, untuk lama menjabat 11 – 15 tahun sebanyak 5 responden dengan persentase 15,2%, untuk 16 – 20 tahun tidak ada dan untuk responden dengan lama menjabat lebih dari 20 tahun sebanyak 9 responden dengan persentase 27,3%.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa mayoritas lama menjabat perangkat desa di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Mranggen adalah 1-5 tahun.

4.1.4 Deskripsi Variabel Penelitian

Deskripsi kuesioner penelitian ini dari setiap variabel dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

4.1.4.1 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X1)

Pada variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memiliki 5 item pernyataan yang harus dijawab oleh responden, hasil dari penyebaran kuesioner ini dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 5 Deskripsi Tanggapan Responden Berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X1)

No	Pernyataan	Jumlah Jawaban Responden					Mean
		STS	TS	N	S	SS	
Lingkungan Pengendalian							
1.	Pimpinan secara terus menerus melakukan penilaian terhadap kualitas <i>lingkungan pengendalian</i> pada pelaporan dana desa	0	0	1	21	11	4,30
Penilaian Risiko							
2.	Pimpinan melakukan analisis <i>penilaian risiko</i> secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap sistem pelaporan dana desa.	0	0	1	23	9	4,24
Kegiatan Pengendalian							
3.	Pegawai dan atasan memahami tujuan dari <i>kegiatan pengendalian</i> pada pelaporan dana desa	0	0	2	21	10	4,24
Informasi dan Komunikasi							
4.	<i>Informasi dan komunikasi</i> terkait pelaporan dana desa disediakan tepat waktu, berkelanjutan, terbuka, relevan dan efektif dengan masyarakat, rekanan dan aparat pengawas intern.	0	0	1	19	13	4,36
Pemantauan							
5.	Pimpinan melakukan <i>pemantauan</i> pengendalian intern pada pelaporan dana desa dan menindak lanjuti temuan serta saran.	0	0	0	23	10	4,30

Sumber: Data Primer yang sudah diolah, 2024

Dari tabel diatas, dapat dilihat distribusi jawaban dari responden dan nilai rata-rata dari jawaban variabel sistem pengendalian intern pemerintah. Berdasarkan pengolahan

data tersebut, didapatkan hasil nilai rata-rata sebesar 4,24 sampai 4,36 dari opsi jawaban yang disediakan ada 5 (lima).

Dari item pernyataan “Informasi dan komunikasi terkait pelaporan dana desa disediakan tepat waktu, berkelanjutan, terbuka, relevan dan efektif dengan masyarakat, rekanan dan aparat pengawas intern” adalah item pernyataan dengan nilai rata-rata jawaban tertinggi yaitu 4,36 dengan 13 responden yang menjawab sangat setuju. Item pernyataan “Pimpinan melakukan analisis penilaian risiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap sistem pelaporan dana desa” dan item pernyataan “Pegawai dan atasan memahami tujuan dari kegiatan pengendalian pada pelaporan dana desa” adalah item pernyataan dengan jawaban responden yang nilai rata-ratanya hanya 4,24 dan menjadi nilai rata-rata terendah. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah yang dilakukan oleh pemerintahan desa sudah baik. Pimpinan masih kurang menyeluruh dalam menganalisis akan timbulnya pelanggaran dana desa dan perangkat desa masih kurang mendalam memahami tujuan dari adanya kegiatan pengendalian. Di sisi lain, informasi dan komunikasi yang disediakan desa terkait pelaporan dana desa sudah sangat baik.

4.1.4.2 Sistem Informasi Akuntansi (X2)

Pada variabel Sistem Informasi Akuntansi (SIA) memiliki 3 item pernyataan yang harus dijawab oleh responden, hasil kuesioner yang didapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 6 Deskripsi Tanggapan Responden Berdasarkan Sistem Informasi Akuntansi (X2)

No	Pernyataan	Jumlah Jawaban Responden					Mean
		STS	TS	N	S	SS	
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah							
1.	Dalam pencatatan laporan keuangan dana desa dicatat sesuai dengan “ <i>penerapan standar akuntansi pemerintah</i> PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)”	0	0	2	24	7	4,15
Pencatatan Transaksi							
2.	Dalam <i>pencatatan transaksi</i> keuangan dana desa dilakukan dan dicatat menggunakan sistem keuangan berbasis teknologi	0	0	0	21	12	4,36
Pembuatan Laporan Keuangan							
3.	Dalam <i>pembuatan laporan keuangan</i> dana desa dicatat sesuai dengan realitas ekonomi (Benar-bener terjadi)	0	0	1	21	11	4,30

Sumber: Data Primer yang sudah diolah, 2024

Tabel 4.6 memperlihatkan informasi yang dijawab oleh 33 responden dan dianggap akurat serta mudah dipahami. Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat jawaban responden dan nilai rata-rata atas pernyataan variabel sistem informasi akuntansi dengan nilai rata-rata mulai 4,15 sampai 4,36 dari 5 opsi jawaban yang disediakan oleh peneliti.

Dari item pernyataan “Dalam pencatatan transaksi keuangan dana desa dilakukan dan dicatat menggunakan sistem keuangan berbasis teknologi” adalah item pernyataan dengan nilai rata-rata jawaban responden tertinggi dengan nilai 4,36 dengan 12 responden menjawab sangat setuju. Item pernyataan “Dalam pencatatan laporan keuangan dana desa dicatat sesuai dengan penerapan standar akuntansi pemerintah PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)” dengan nilai rata-rata 4,15 menjadi item pernyataan dengan nilai terendah dengan 7 responden yang menjawab sangat setuju. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pencatatan keuangan dana desa di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Mranggen sudah dicatat dengan menggunakan pencatatan berbasis teknologi dan Pencatatan laporan keuangan yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Namun sudah menggunakan standar pencatatan dalam aplikasi teknologi yang digunakan untuk mengelola dana desa.

4.1.4.3 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Pada variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa memiliki 5 item pernyataan yang harus dijawab oleh responden, hasil dari penyebaran kuesioner ini dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 7 Deskripsi Tanggapan Responden Berdasarkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

No	Pernyataan	Jumlah Jawaban Responden					Mean
		STS	TS	N	S	SS	
Kejujuran dan Keterbukaan Informasi							
1.	<i>Kejujuran dan keterbukaan informasi pemerintah desa dalam mengungkapkan kondisi dan peristiwa dalam laporan keuangan ditunjukkan melalui papan informasi/spanduk/baliho.</i>	0	0	0	16	17	4,52
Kepatuhan Pelaporan							
2.	<i>Kepatuhan pelaporan keuangan desa disusun sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan disampaikan secara tepat waktu dan menyeluruh.</i>	0	0	0	20	13	4,39
Kesesuaian Prosedur							

3.	Laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dihasilkan melalui <i>prosedur yang sesuai</i> .	0	0	0	22	11	4,33
Kecukupan Informasi							
4.	Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa memuat <i>kecukupan informasi</i> yang akurat dan terpercaya.	0	0	0	23	10	4,30
Ketepatan Penyampaian Laporan							
5.	<i>Ketepatan penyampaian laporan</i> pemerintah desa terkait pengelolaan dana desa disampaikan secara tepat waktu.	0	0	0	23	10	4,30

Sumber: Data Primer yang sudah diolah, 2024

Pada tabel 4.7 diatas, dapat dilihat distribusi jawaban dari 33 responden yang menjawab 5 item pernyataan pada variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam pengolahan data penelitian tersebut didapat nilai rata-rata sebesar 4,30 sampai 4,52 dari 5 (lima) opsi jawaban yang disediakan oleh peneliti.

Pada item pernyataan mengenai indikator kejujuran dan keterbukaan informasi yang berbunyi “Kejujuran dan keterbukaan informasi pemerintah desa dalam mengungkapkan kondisi dan peristiwa dalam laporan keuangan ditunjukkan melalui papan informasi/spanduk/baliho” menjadi item pernyataan dengan nilai rata-rata tertinggi yaitu 4,52 dengan 17 responden menjawab sangat setuju. Sedangkan item pernyataan pada indikator kecukupan informasi yang berbunyi “Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa memuat kecukupan informasi yang akurat dan terpercaya” dan pernyataan “Ketepatan penyampaian laporan pemerintah desa terkait pengelolaan dana desa disampaikan secara tepat waktu” menjadi item pernyataan dengan nilai rata-rata terendah yaitu 4,30. Maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Mranggen dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban masih kurang menyeluruh dalam memuat informasi yang akurat dan terpercaya dan penyampaiannya terkadang kurang tepat waktu dikarenakan beberapa kendala. Namun, kejujuran dan keterbukaan informasi sudah baik dengan dibuktikan adanya media cetak seperti spanduk, papan informasi atau baliho untuk memaparkan laporan keuangan dana desanya.

4.1.4.4 Religiusitas Perangkat Desa (Z)

Pada variabel moderasi Religiusitas Perangkat Desa memiliki 4 (empat) item pernyataan yang disediakan oleh peneliti kepada responden, hasil yang didapat dari penyebaran kuesioner dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 8 Deskripsi Tanggapan Responden Berdasarkan Religiusitas Perangkat Desa (Z)

No	Pernyataan	Jumlah Jawaban Responden					Mean
		STS	TS	N	S	SS	
Keyakinan							
1.	<i>Keyakinan</i> perangkat desa terhadap agama dapat mendukung pelaporan dana desa yang akuntabel	0	1	2	17	13	4,27
Praktik Agama							
2.	<i>Praktik agama</i> yang dilakukan perangkat desa seperti berdoa, sholat, dan sedekah dapat mendukung pelaporan dana desa yang akuntabel.	0	1	1	22	9	4,18
Pengalaman Spritual							
3.	<i>Pengalaman spritual</i> yang perangkat desa alami dapat menjadikan laporan pengelolaan dana desa menjadi lebih akuntabel.	0	1	7	19	6	3,91
Pengetahuan							
4.	Perangkat desa rajin mengikuti pengajian yang ada di lingkungan desa untuk menambah <i>pengetahuan</i> agar dapat mendukung pelaporan dana desa yang akuntabel.	0	2	4	18	9	4,03

Sumber: Data Primer yang sudah diolah, 2024

Dari tabel 4.8 diatas, memperlihatkan distribusi pernyataan pada variabel moderasi religiusitas perangkat desa dengan 4 (empat) item pernyataan yang dijawab oleh para responden dan didapat nilai rata-rata dari pengolahan data sebesar 3,91 sampai dengan 4,27 dari 5 (lima) opsi jawaban yang disediakan oleh peneliti.

Pada item pernyataan indikator keyakinan yang berbunyi “Keyakinan perangkat desa terhadap agama dapat mendukung pelaporan dana desa yang akuntabel” merupakan item pernyataan dengan nilai rata-rata tertinggi yaitu sebesar 4,27 dengan 13 responden yang menjawab sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Namun, pada item pernyataan indikator pengalaman spritual yang berbunyi “Pengalaman spritual yang perangkat desa alami dapat menjadikan laporan pengelolaan dana desa menjadi lebih akuntabel” menjadi item pernyataan dengan jawaban rata-rata terendah yaitu hanya sebesar 3,91 dengan 6 responden menjawab sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa banyak perangkat desa di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Mranggen yang ketika mengalami pengalaman spritual itu kurang meningkatkan dalam pengelolaan dana desa menjadi akuntabel. Namun, kepercayaan perangkat desa terhadap agama terutama agama Islam, dikarenakan semua responden beragama Islam dipercaya oleh perangkat desa dalam mendukung pelaporan keuangan dana desa yang akuntabel yang disebabkan oleh keyakinan ajaran agamanya.

4.1.5 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pengukuran skala likers dengan analisis jalur. Alat yang digunakan dalam pengujian data serta pengujian model moderasi ini menggunakan *Structural Equation Modeling – Partial Least Square* (SEM – PLS). Analisis PLS merupakan teknik statistik multivariate yang melakukan perbandingan diantara variabel independen dengan variabel dependen berganda seta variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan *WarpPLS 7.0*.

4.1.6 Evaluasi Model

4.1.6.1 Model Pengukuran (Outer Model)

Model pengukuran (Outer model) digunakan untuk menentukan hubungan antara variabel laten dengan variabel indikatornya. Dalam model pengukuran ini menggunakan uji *Convergent validity*, *Composite Reliability*, dan *Discriminan Validity*.

1) *Convergent Validity*

Pengujian validitas ini digunakan untuk melihat apakah setiap item pernyataan dari variabel akan lebih mudah dimengerti ketika melakukan uji validitas sesuai dengan kriteria. Pengujian ini juga digunakan untuk melihat bagaimana indikator yang berkolasi positif dengan indikator yang lain untuk konstruk yang sama. Berikut merupakan hasil dari pengujian *Convergent validity* sebagai berikut:

Tabel 4. 9 Uji *Convergent validity*

Variabel	Item/indikator	<i>Outer Loading</i>	Keterangan
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Y.1	0,767	<i>Valid</i>
	Y.2	0,875	<i>Valid</i>
	Y.3	0,910	<i>Valid</i>
	Y.4	0,854	<i>Valid</i>
	Y.5	0,899	<i>Valid</i>
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X1)	X1.1	0,791	<i>Valid</i>
	X1.2	0,874	<i>Valid</i>
	X1.3	0,725	<i>Valid</i>
	X1.4	0,734	<i>Valid</i>
	X1.5	0,812	<i>Valid</i>
	X2.1	0,672	<i>Valid</i>

Sistem Informasi Akuntansi (X2)	X2.2	0,770	<i>Valid</i>
	X2.3	0,779	<i>Valid</i>
Religiusitas Perangkat Desa (Z)	Z.1	0,770	<i>Valid</i>
	Z.2	0,711	<i>Valid</i>
	Z.3	0,757	<i>Valid</i>
	Z.4	0,894	<i>Valid</i>

Sumber: Output WarpPLS 7.0, 2024

Dari hasil tabel 4.9 dapat dilihat bahwa hasil perhitungan semua item variabel kuesioner diatas menunjukkan nilai outer loading lebih besar daripada 0,6 ($> 0,6$). Maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item pernyataan kuesioner pada setiap variabel dapat dinyatakan valid untuk mengukur setiap variabelnya dan dapat dilakukan pengujian data lebih lanjut.

Tabel 4. 10 Analisis Average Varian Extracted

Variabel	Avarage Varian Extracted	Keterangan
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,744	Valid
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X1)	0,623	Valid
Sistem Informasi Akuntansi (X2)	0,550	Valid
Religiusitas Perangkat Desa (Z)	0,618	Valid

Sumber: Output WarpPLS 7.0, 2024

Pengukuran lain yang dapat digunakan untuk mengukur validitas adalah dengan melihat nilai *Average Varian Extracted* (AVE). Menurut Wiyono (2011:403) menjelaskan bahwa nilai AVE harus diatas 0,50 ($> 0,50$). Dapat dilihat dari tabel 4.10 bahwa nilai AVE masing-masing variabel semuanya diatas 0,50, dengan nilai terendah pada variabel sistem informasi akuntansi (X2) sebesar 0,550 dan nilai tertinggi pada variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) sebesar 0,744.

2) *Composite reliability*

Pengujian ini dilakukan bertujuan untuk menguji nilai-nilai reliabilitas pada indikator suatu variabel. suatu variabel dapat dikatakan memenuhi kriteria *composite reliability* apabila nilai *composite reliability* nya lebih besar dari 0,70 ($> 0,70$). Berikut ini merupakan hasil pengujian pada masing-masing variabel sebagai berikut:

Tabel 4. 11 Hasil composite reliability

Variabel	<i>Composite Reliability</i>	Keterangan
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,935	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X1)	0,891	Reliabel
Sistem Informasi Akuntansi (X2)	0,785	Reliabel
Religiusitas Perangkat Desa (Z)	0,865	Reliabel

Sumber: Output WarpPLS 7.0, 2024

Dapat dilihat pada tabel 4.11 bahwa keseluruhan variabel memiliki nilai *composite reliability* lebih dari 0,70 ($> 0,70$). Sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh variabel telah memenuhi kriteria *composite reliability* dan juga dapat disimpulkan bahwa semua indikator dalam penelitian yang digunakan dalam mengukur sistem pengendalian intern pemerintah (X1), sistem informasi akuntansi (X2), akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y), dan religiusitas perangkat desa (Z) telah memenuhi syarat reliabel.

3) *Discriminant Validity*

Pengujian ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar variabel laten memiliki perbedaan dengan variabel lainnya. model dapat dikatakan memiliki validitas diskriminan yang cukup besar apabila akar AVE untuk setiap konstruk lebih besar daripada korelasi antar konstruk lainnya dalam model tersebut (Jogiyanto, 2015:195). Nilai akar AVE dan korelasi variabel laten dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 12 Nilai Akar AVE dan Korelasi Variabel Laten

	X1	X2	Z	Y	Z*X1	Z*X2
X1	(0.789)	0.643	0.025	0.639	0.221	0.206
X2	0.643	(0.742)	0.312	0.710	0.162	0.267
Z	0.025	0.312	(0.786)	0.089	0.322	0.530
Y	0.639	0.710	0.089	(0.863)	0.115	0.162
Z*X1	0.221	0.162	0.322	0.115	(1.000)	0.810
Z*X2	0.206	0.267	0.530	0.162	0.810	(1.000)

Sumber: Output WarpPLS 7.0, 2024

Berdasarkan tabel 4.12 dapat dilihat nilai akar AVE dan korelasi antar variabel laten tersebut menunjukkan keseluruhan variabel dinyatakan valid karena nilai akar AVE $>$ korelasi variabel laten.

4.1.6.2 Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Pengujian inner model atau model struktural digunakan untuk menguji hipotesis dari hubungan antara variabel laten dengan variabel laten lainnya. pada pengujian inner model ini meliputi pengujian koefisien determinasi (*R-Squared*), relevansi prediksi (*Q-Squared*), dan ukuran efek (*F-Square*). Berikut ini merupakan hasil dari pengujian inner model:

Tabel 4. 13 Nilai R^2 , Q^2 , F^2

Variabel	R-Square	Q-Square	F-Square
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,553	0,618	
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X1)			0,312
Sistem Informasi Akuntansi (X2)			0,275
Religiusitas Perangkat Desa (Z)			

Sumber: Output WarpPLS 7.0, 2024

Berdasarkan tabel 4.13 diketahui dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk melihat kemampuan variabel eksogen dalam menunjukkan lemah maupun kuatnya dalam mempengaruhi suatu model penelitian. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai R-Square pada variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa yang memiliki nilai 0,553 atau 55,3% yang artinya akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dijelaskan oleh variabel sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem informasi akuntansi sebesar 55,3% dan sisanya 44,7% dijelaskan oleh variabel lainnya diluar penelitian.
- Relevansi prediksi (Q^2) menunjukkan bahwa nilai dari relevansi prediksi dalam menjelaskan hubungan konstruk laten untuk modle penelitian ini sebesar 0,618 atau 61,8% atas kontribusi variabel yang ada dalam penelitian ini, baik kontribusi secara langsung maupun tidak langsung dan sisanya sebesar 38,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa hasil dari Q-Square menunjukkan estimasi model dalam penelitian ini memiliki kapabilitas prediksi yang besar dikarenakan nilai Q-Square lebih dari 0,35.
- Ukuran efek (F^2) untuk nilai variabel sistem pengendalian intern pemerintah (X1) sebesar 0,312 yang termasuk dalam kategori sedang dan dapat diartikan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah memiliki pengaruh yang sedang terhadap akuntabilitas

pengelolaan dana desa. Variabel sistem informasi akuntansi (X2) sebesar 0,275 yang termasuk ke dalam kategori sedang dan dapat diartikan bahwa sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh sedang terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Uji Kecocokan model (*Goodness of Fit Model*), dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 14 Goodness of Fit Model

Kriteria	Cut of Value	Hasil	Evaluasi
<i>Average Path Coefficient (APC)</i>	P-value \leq 0,05	0,021	Terpenuhi
<i>Avarage R-Squared (ARS)</i>	P-value \leq 0,05	<0,001	Terpenuhi
<i>Average adjusted R Squared (AARS)</i>	P-value \leq 0,05	<0,001	Terpenuhi
<i>Average block VIF (AVIF)</i>	\leq 3,3, namun nilai \leq 5 masih dapat di terima	3,519	Ideal
<i>Tenenhaus GoF (GoF)</i>	\geq 0,10, \geq 0,25, dan \geq 0,36 (kecil, sedang, besar)	0,646	Besar

Sumber: Output WarpPLS 7.0, 2024

Hasil uji kecocokan model secara keseluruhan dapat dilihat dari tabel 4.14 diatas. Hasil P-value *Average Path Coefficient (APC)* sebesar 0,021 dan masih dibawah 0,05 sehingga kriteria terpenuhi, sedangkan nilai P-value *Avarage R-Squared (ARS)* sebesar <0,001 berarti <0,05 sehingga kriteria terpenuhi, untuk nilai P-value *Average adjusted R Squared (AARS)* sebesar <0,001 yang berarti kurang dari 0,05 sehingga kriteria terpenuhi dan dapat dikatakan layak. Selanjutnya untuk perhitungan nilai *Average block VIF (AVIF)* pada tabel senilai 3,519 sehingga masih dapat dikatakan ideal dan juga berarti tidak terjadi multikolonieritas. Hasil perhitungan *Tenenhaus GoF (GoF)* sebesar 0,646 sehingga dapat dikatakan bahwa kekuatan prediksi model yang dibangun untuk memprediksi hubungan antara variabel berisifat besar sesuai dengan ketentuan yang ada. Dari hasil keseluruhan tersebut maka dapat dikatakan bahwa keseluruhan model penelitian dianggap cocok dan layak

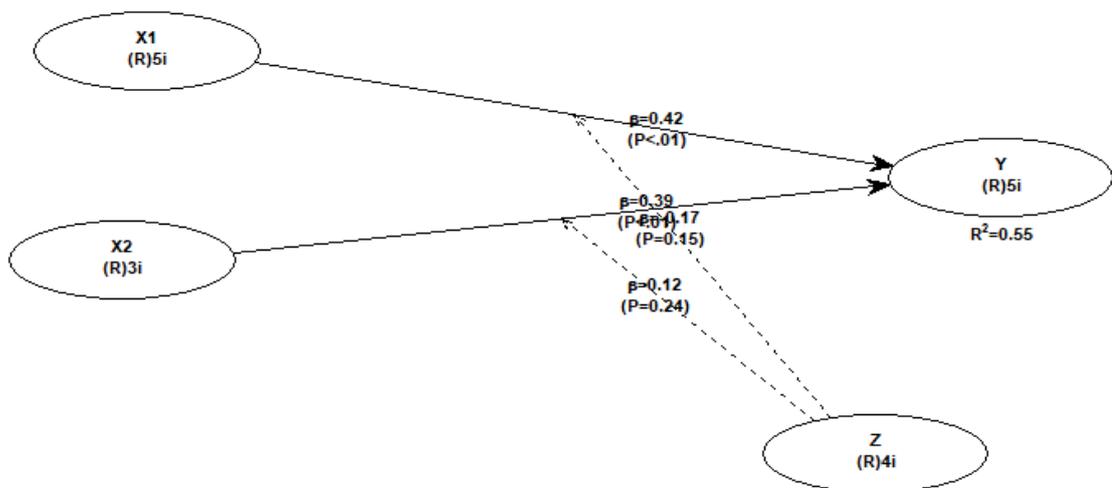
4.1.6.3 Hasil Pengujian Hipotesis.

Penelitian ini menggunakan metode *Partial Least Square (PLS)*. Dalam metode PLS ini penilaian yang digunakan meliputi penilaian model struktural (inner model). Analisis model struktural dapat dilakukan dengan melihat hasil dari parameter koefisien

path dan tingkat signifikansinya. Pengujian hipotesis ini digunakan untuk menguji kebenaran dari hipotesis yang telah dirumuskan.

Korelasi antar variabel dapat diukur dengan melihat koefisien jalur (*path coefficient*) dan tingkat signifikansinya, kemudian membandingkan dengan hipotesis penelitian yang telah dirumuskan. Tingkat signifikansi yang digunakan pada penelitian ini adalah sebesar 0,05, dengan dasar pengambilan keputusan jika nilai P-value ≥ 0.05 , maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Sedangkan apabila nilai P-value ≤ 0.05 , maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Gambar 4. 2 Full Model Penelitian



Sumber: Output WarpPLS 7.0, 2024

Berdasarkan gambar 4.2 diatas, dapat disajikan pada tabel dibawah ini untuk melihat lebih jelas nilai *path coefficient* dan nilai signifikansinya.

Tabel 4. 15 Nilai Path Coefficient dan Nilai P-Value

Variabel	Path Coefficient	P-Value	Kesimpulan
X1 -> Y	0,422	0,003	Berpengaruh
X2 -> Y	0,385	0,006	Berpengaruh

(X1 -> Y)*M	-0,169	0,150	Tidak Memoderasi
(X2 -> Y)*M	0,117	0,242	Tidak Memoderasi

Sumber: Output WarpPLS 7.0, 2024

Berdasarkan hasil dari tabel 4.15 diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil evaluasi jalur membuktikan kedua variabel independen (sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem informasi akuntansi) semuanya saling berpengaruh terhadap variabel dependen (akuntabilitas pengelolaan dana desa). Sehingga dapat dijelaskan bahwa:

- 1) Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- 2) Sistem informasi akuntansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4.1.6.4 Evaluasi Hubungan Moderasi

Variabel moderasi merupakan suatu variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian variabel moderasi pada *WarpPLS* dapat dilihat dari hasil output *view path coefficient* dan *P-Value*. Nilai signifikansi yang digunakan adalah 5% atau 0,05. Berikut merupakan hasil evaluasi hubungan moderasi:

Tabel 4. 16 Hasil Evaluasi Hubungan Moderasi

Variabel	<i>Path Coefficient</i>	<i>P-Value</i>	Kesimpulan
Z -> X1 * Y	-0,169	0,150	Tidak Memoderasi
Z -> X2 * Y	0,117	0,242	Tidak Memoderasi

Sumber: Output WarpPLS 7.0, 2024

Berdasarkan hasil evaluasi hubungan moderasi dari tabel 4.16 diatas, dapat dilihat dan disimpulkan bahwa variabel religiusitas perangkat desa sebagai variabel moderasi tidak mampu memperkuat hubungan antara sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4.2 Pembahasan Penelitian

Hasil pengujian yang dikembangkan dalam penelitian ini secara ringkas dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. 17 Hasil Pengujian Hipotesis

hipotesis	Hasil penelitian	penjelasan
Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa	Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa	Semakin tinggi dan baik sistem pengendalian intern pemerintah, maka akan semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa	Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa	Semakin baik penggunaan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan dana desa, maka akan semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan dana desa
Religiusitas perangkat desa memoderasi sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa	Religiusitas perangkat desa tidak dapat memoderasi pengaruh SPIP terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa	Religiusitas perangkat desa tidak dapat memperkuat hubungan antara SPIP terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Religiusitas perangkat desa memoderasi sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa	Religiusitas perangkat desa tidak dapat memoderasi pengaruh SIA terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.	Religiusitas perangkat desa tidak dapat memperkuat hubungan antara SIA terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Hasil pengujian yang dikembangkan dalam penelitian ini meneliti tentang pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan religiusitas perangkat desa sebagai variabel moderasi. Penjelasan mengenai masing-masing variabel akan dikembangkan dalam penjelasan sebagai berikut:

1. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan analisis yang dilakukan dan uji hipotesis diatas, menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern pemerintah (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Uji hipotesis menunjukkan besarnya nilai *path coefficients* adalah 0,422 dan nilai *p-value* 0,003 atau $< 0,05$. Nilai *path coefficients* memiliki arah positif, menunjukkan arti jika sistem pengendalian intern pemerintah naik sebesar 1 satuan, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa meningkat sebesar 0,422. Sehingga disimpulkan bahwa H1 “Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” **diterima**

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori *stewardship* yang menyatakan bahwa setiap organisasi mementingkan tujuan organisasi diatas tujuan individu untuk mewujudkan kesejahteraan bagi semua pihak. Untuk mencapai tujuan organisasi agar tidak melenceng, maka harus ada pengawasan dan pengendalian yang mengatur akan hal tersebut. Sistem pengendalian intern pemerintah yang diawasi oleh kepala desa merupakan bentuk pengawasan dan pengendalian agar tidak terjadi penyelewengan dari tujuan organisasi. Sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Husain et al (*Jambura Accounting Review Journal homepage*, 2023: 66-76) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah yang baik dapat menjamin kegiatan pemerintah desa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, keandalan laporan keuangan lebih berkualitas sehingga meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada pemerintahan desa maka akan semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan dana desa di pemerintah desa Kecamatan Sayung dan Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

2. Sistem Informasi Akuntansi Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan analisis yang dilakukan dan uji hipotesis diatas, menunjukkan bahwa variabel sistem informasi akuntansi (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Uji hipotesis menunjukkan nilai *path coefficients* sebesar 0,385 dan nilai *p-value* 0,006 atau $< 0,05$., Nilai *path coefficients* memiliki arah positif, berarti jika sistem informasi akuntansi naik sebesar 1 satuan, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa meningkat sebesar 0,385. Sehingga disimpulkan bahwa H2 “Sistem Informasi Akuntansi Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” **diterima**

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori *stewardship* yang menjelaskan bahwa kepala desa sebagai pimpinan harus mementingkan tujuan organisasi dari pada tujuan pribadi. Sistem informasi akuntansi digunakan untuk mempermudah perangkat desa dalam mengelola keuangan dana desa, sehingga mempermudah penyajian laporan pertanggungjawaban dari pengelolaan dana desa untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi. Keandalan laporan keuangan keuangan lebih berkualitas dan terstruktur sehingga meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penggunaan sistem informasi akuntansi bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam organisasi, dengan menyediakan data yang terstruktur dan terorganisasi. Sehingga manajemen dapat mengambil keputusan yang tepat dan baik sesuai dengan tujuan organisasi.

Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Devi E. et al. (2023) yang menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi secara positif dan signifikan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa pemerintah desa harus memiliki sistem informasi akuntansi yang baik, yang tidak hanya sekedar alat pengendali transaksi keuangan, namun sistem informasi akuntansi yang digunakan harus mendukung tercapainya tujuan yang bersifat hierarkis. Hal ini menunjukkan semakin baik sistem informasi akuntansi di pemerintah desa maka semakin akuntabilitas pengelolaan dana desa sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

3. Religiusitas Perangkat Desa Memoderasi Hubungan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan analisis yang dilakukan dan uji hipotesis diatas, menunjukkan bahwa variabel moderasi M1 (interaksi antara sistem pengendalian intern pemerintah dan religiusitas perangkat desa) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Uji hipotesis menunjukkan nilai *path coefficients* negatif 0,169 (-0,169) dan *p-value* 0,150 atau $> 0,05$,. Nilai *path coefficients* sebesar -0,169 memiliki arah negatif, berarti jika interaksi antara sistem pengendalian intern pemerintah dan religiusitas perangkat desa (M1) naik sebesar 1 satuan, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa menurun sebesar -0,169. Sehingga disimpulkan bahwa H3 “Religiusitas Perangkat Desa Memperkuat Hubungan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” **ditolak**

Penelitian ini sesuai dengan penggunaan teori *stewardship* yang menyatakan bahwa SPIP akan mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa, dikarenakan sistem pengendalian intern pemerintah berfungsi sebagai pengawas serta pengendalian agar kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sesuai dengan tujuan organisasi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Handayani et al. (2021) menjelaskan bahwa religiusitas merupakan keyakinan yang dimiliki oleh individu termasuk perangkat desa bahwa perangkat desa percaya dengan adanya Tuhan, dimana dapat mengakibatkan perangkat desa akan takut melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku. Seorang perangkat desa yang memiliki pengetahuan keagamaan akan berusaha untuk menjalankan perintah dan menjauhi larang dari agamanya. Akan tetapi hasil dari penelitian ini menunjukkan tidak ada pengaruh antara religiusitas perangkat desa dengan hubungan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dan hasil penelitian ini juga menyebutkan jika semakin religius perangkat desa maka akan semakin rendah dalam mematuhi sistem pengendalian intern pemerintah dan akan mengurangi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Religiusitas perangkat desa belum mampu memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal tersebut terjadi dikarenakan perangkat desa menyakini dan percaya terhadap Allah

Subhanahu Wata'ala tetapi tidak selalu mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-harinya. Disisi lain kurangnya pemahaman agama secara luas sehingga perangkat desa menganggap bahwa sistem pengendalian intern pemerintah terpisah dengan ajaran agama sehingga berasumsi bahwa jika tidak menaati maka tidak berdosa yang mengakibatkan tidak termotivasinya perangkat desa dalam mematuhi peraturan pemerintah desa dan lebih memilih kegiatan yang diajarkan dalam agama. Hal ini menyebabkan religiusitas perangkat desa tidak memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4. Religiusitas Perangkat Desa Tidak Memoderasi Hubungan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan analisis yang dilakukan dan uji hipotesis diatas, menunjukkan bahwa variabel moderasi M2 (interaksi antara sistem informasi akuntansi dan religiusitas perangkat desa) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Uji hipotesis menunjukkan nilai *path coefficients* sebesar 1,117 dan nilai *p-value* sebesar 0,242 atau $> 0,05$., Nilai *path coefficients* arah positif, berarti jika interaksi antara sistem informasi akuntansi dan religiusitas perangkat desa (M2) naik sebesar 1 satuan, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa meningkat sebesar 0,117. Sehingga disimpulkan bahwa H4 “Religiusitas Perangkat Desa Memoderasi Hubungan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” **ditolak**

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nursin et al. (2022: 77-101) menyatakan bahwa dengan sikap religiusitas yang tinggi akan berdampak pada kecerdasan spritual yang dimiliki tinggi juga yang akan berdampak pada pengoptimalan kemampuan dalam penggunaan dan memanfaatkan sistem informasi akuntansi yang menyebabkan perangkat desa menghasilkan output pengelolaan dana desa yang transparansi dan akuntabel.

Religiusitas perangkat desa di desa di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tergolong cukup tinggi, namun belum dapat memperkuat pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Hal tersebut karena perangkat desa menganggap bahwa sistem

informasi akuntansi terpisah dengan agama serta dalam kenyataannya dalam pengelolaan dana desa belum diaplikasikan secara maksimal sehingga kurang terstruktur dan terorganisasi. Perangkat desa di desa di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak bermayoritas sudah berusia lanjut dengan tingkat pendidikan SLTA sehingga banyak perangkat desa yang kurang paham dengan teknologi seperti sistem informasi akuntansi dalam pencatatan transaksi keuangan dana desa yang pada akhirnya religiusitas yang dimiliki perangkat desa tidak mampu memoderasi pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah, sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan religiusitas perangkat desa sebagai variabel moderasi. Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Hal ini karena di Kabupaten Demak sudah ada Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 46 Tahun 2022 tentang pedoman penilaian maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Demak. Sehingga perangkat desa harus mematuhi aturan tersebut. Pemerintah desa di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Mranggen juga sudah memahami tujuan dari adanya peraturan tersebut serta sudah adanya pengawasan dari kepala desa setempat.
2. Sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Hal ini dikarenakan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan transaksi dana desa di desa di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Mranggen sudah catat menggunakan sistem keuangan berbasis teknologi dengan bantuan *software* tersendiri untuk mencatat pengelolaan dana desa. Pemerintah Kabupaten Demak juga sudah memiliki sistem informasi akuntansi terkait pengelolaan dana desa yaitu Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Online Terintegrasi Cash Management System CMS Bank Jateng atau E-TEKAD (Elektronik Transaksi Keuangan Desa) yang bertujuan untuk meminimalisir penyalahgunaan dana desa serta membuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
- 3.a Religiusitas perangkat desa tidak memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Dikarenakan kurangnya pemahaman perangkat desa mengenai agama secara luas dan belum mengerti tentang nilai sistem pengendalian intern pemerintah dalam perspektif agama, sehingga

perangkat desa berasumsi bahwa sistem pengendalian intern pemerintah terpisah dengan ajaran agama. Hal tersebut mengakibatkan kurang terdorongnya perangkat desa yang religius untuk menaati sistem pengendalian intern pemerintah dan lebih memilih menjalankan kegiatan keagamaan.

3.b Religiusitas perangkat desa tidak memoderasi pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Hal tersebut dikarenakan perangkat desa menganggap bahwa sistem informasi akuntansi tidak ada kaitannya dengan agama serta mayoritas perangkat desa di desa di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Mranggen sudah berusia lanjut dengan tingkat pendidikan SLTA sederajat, sehingga perangkat desa kurang mengerti dengan pencatatan transaksi berbasis teknologi seperti sistem informasi akuntansi pada pengelolaan dana desa. Sehingga religiusitas yang dimiliki perangkat desa tidak mampu memoderasi pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentu memiliki beberapa keterbatasan yang kemungkinan dapat mempengaruhi hasil dari penelitian ini. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data penelitian ini diperoleh menggunakan kuesioner, yaitu responden memilih jawaban berdasarkan persepsi masing-masing, penelitian ini tidak mampu mengontrol sepenuhnya terhadap kesungguhan dan kejujuran responden dalam memilih jawaban yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel sistem pengendalian intern pemerintah, sistem informasi akuntansi sebagai variabel independen, variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai variabel dependen, dan religiusitas perangkat desa sebagai variabel moderasi.
3. Religiusitas merupakan hubungan batin antara hamba (manusia) dengan Tuhan Yang Maha Esa. Penggunaan variabel religiusitas tidak dapat diukur secara material, sehingga tingkat religiusitas perangkat desa sulit untuk dilakukan pengukuran dalam penelitian.

5.3 Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa saran untuk penelitian selanjutnya agar menjadi bahan evaluasi untuk penelitian yang lebih baik, seperti berikut:

1. Bagi pemerintah desa di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, untuk sistem pengendalian intern pemerintah desa dan sistem informasi akuntansi dalam pencatatan dana desa sudah baik, namun religiusitas yang dimiliki perangkat desa kurang dapat mendorong hal tersebut, sehingga disarankan untuk pimpinan (kepala desa) untuk mengintruksikan atau mengarahkan perangkat desa agar dapat mengimplementasikan sikap religiusitasnya dan menjadikan peran agama sebagai dasar perilaku dalam ruang lingkup pemerintahan, agar dapat mendorong sistem pengendalian intern pemerintah menjadi lebih baik, serta mendorong keinginan untuk belajar suatu hal baru, terutama dalam bidang teknologi. Sehingga dapat menjadikan pengelolaan dana desa berbasis sistem informasi akuntansi menjadi lebih baik serta seluruh perangkat desa diharapkan dapat memahaminya.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan variabel lainnya yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak seperti kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, pengawasan serta variabel lainnya yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Serta diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penyebab religiusitas perangkat desa tidak dapat memoderasi sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem informasi akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelraheem, A. A. E., Hussaien, A. M., Mohammed, M. A. A., & Elbokhari, Y. A. E. (2021). The effect of information technology on the quality of accounting information. *Accounting*, 7(1), 191–196. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.9.017>
- Adeyemi, F. K., & Olarewaju, O. M. (2019). Internal Control System and Financial Accountability: An Investigation of Nigerian South-Western Public Sector. In *ACTA UNIVERSITATIS DANUBIUS* (Vol. 15).
- Ahmad, S., & Sapar, S. (2023). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparat, Sistem Keuangan Desa dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Luwu Timur. *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Indonesia*, 3(2), 81–93. <https://doi.org/10.52436/1.jpti.278>
- Alam, M. M., Said, J., & Abd Aziz, M. A. (2019). Role of integrity system, internal control system and leadership practices on the accountability practices in the public sectors of Malaysia. *Social Responsibility Journal*, 15(7), 955–976. <https://doi.org/10.1108/SRJ-03-2017-0051>
- Arthur Simanjuntak, Farida Sagala, & Selvina Dwi Putri. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Perkebunan Afdeling 1, Desa Kampung Baru, Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu. *Jurnal Manajemen Volume 9 Nomor 1*. <http://ejournal.lmiimedan.net>
- Atmadja, A. T., Adi, K., & Saputra, K. (2018). The influence of role conflict, complexity of assignment, role obscurity and locus of control on internal auditor performance. In *Article in Academy of Accounting and Financial Studies Journal*. <https://www.researchgate.net/publication/329733034>
- Audia, U. N., & Mulyani, E. (2023). Pengaruh Transparansi, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kepatuhan Undang-Undang terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 5(2), 691–706. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.680>
- Aziz, M. A. A., Rahman, H. A., Alam, Md. M., & Said, J. (2015). Enhancement of the Accountability of Public Sectors through Integrity System, Internal Control System and

- Leadership Practices: A Review Study. *Procedia Economics and Finance*, 28, 163–169. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01096-5](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01096-5)
- Bawono, I. R., Kinasih, A. D. M., & Rahayu, A. K. (2020). Factors Affecting Accountability of Village Fund Management through Implementation of the Village Financial System (SISKEUDES). *Journal of Accounting and Investment*, 21(3). <https://doi.org/10.18196/jai.2103160>
- Bisnis, M., Akuntansi, D., Handayani, A. R., Sudrajat, A., & Amah, N. (2021). *SIMBA SEMINAR INOVASI MAJEMEN BISNIS DAN AKUNTANSI 3 Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak UMKM dengan Religiusitas sebagai Pemoderasi (Studi Kasus pada UMKM di Kabupaten Ponorogo)*.
- BPS Kabupaten Demak. (2022). *A XXXXX Dalam Angka 2022 BADAN PUSAT STATISTIK XXXXX BPS-STATISTICS OF XXXXX KECAMATAN MRANGGEN DALAM ANGKA MRANGGEN SUBDISTRICT IN FIGURES*.
- Brenya Bonsu, A., Appiah, K. O., Gyimah, P., & Owusu-Afriyie, R. (2022). Public sector accountability: do leadership practices, integrity and internal control systems matter? *IIM Ranchi Journal of Management Studies*. <https://doi.org/10.1108/irjms-02-2022-0010>
- Budi Hartono, S., Zaenuri, W., Mutiara Savitri, F., Noor Farida, D., & Ristianawati, Y. (2021). ALOKASI ANGGARAN, INTELLECTUAL CAPITAL, KINERJA KEUANGAN, DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN LAYANAN UMUM. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 07(01). <https://doi.org/10.34204/jiafe.v7i1.2915>
- Budi Hendaris, R., Siraz, R., & Yani, J. A. (2020). *ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING THE ACCOUNTABILITY OF VILLAGE FUNDS MANAGEMENT*. 1(3). <https://doi.org/10.31933/DIJEMSS>
- Budiana, D. A., Said, D., & -, N. (2019). THE EFFECT OF VILLAGE DEVICE COMPETENCIES AND INTERNAL CONTROL SYSTEM ON ACCOUNTABILITY OF 2021 <https://doi.org/10.31364/scirj/v7.i1.2019.p0119599>
- Budiarto, D. S., Setyaningrum, A. D., & Sari, R. P. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Faktor Anteseden yang Mempengaruhinya. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 23(2), 145–159. <https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2.240>

- Chalista Rambu O, & Rochmad Bayu U. (2023). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Peran Perangkat Desa dan Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Sosial dan Sains, Volume 3 Nomor 5*.
- Chit, M. M. (2019). Financial Information Credibility, Legal Environment, and SMEs' Access to Finance. *International Journal of the Economics of Business*, 26(3), 329–354. <https://doi.org/10.1080/13571516.2019.1645379>
- Desy, P. A., Dewi, R., & Julianto, I. P. (2020). *PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS DANA DESA*. 11(2).
- Dewi, Y. A., Nasfi,), Yuliza, M., Study, S. B., Banking, S., Program, S., Manna, S., Salwa, W., & Panjang, P. (2021). INTERNAL CONTROL SYSTEM, UTILIZATION OF ACCOUNTING INFORMATION TECHNOLOGY, ON VILLAGE FUND MANAGEMENT ACCOUNTABILITY. *Business and Accounting Research (IJEBAR) Peer Reviewed-International Journal*, 5. www.djpk.kemenkeu.go.id
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Emma Meiliza Afifah, & Raden Ajeng Retno Kumolohadi. (2022). Hubungan Religiusitas dan Stres pada Individu Muslim Dewasa Awal. *Jurnal Riset Psikologi*, 105–108. <https://doi.org/10.29313/jrp.v2i2.1599>
- Estrilia, D., Wijayanti, I., & Hidayah, N. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Penerapan Sistem Akuntansi dan Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 20(1), 01–11. <https://doi.org/10.36406/jam.v20i01.681>
- Fauzi, M., & Mujaddid, A. Y. (2023). Building Competitive Advantage Through Halal Assurance System and Employee Performance. *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, 4(2), 80–104. <https://doi.org/10.21580/jdmhi.2022.4.2.11076>
- Ghozali, I. (2014). Partial Least Square Konsep, Metode, dan Aplikasi Menggunakan Program WarpPLS 4.0. Bdan Penerbit UNDIP.
- Hamid Rahmad Solling dan Anwar Suhardi M. (2019). Structural Equation Modeling (SEM) Berbasis Varian Konsep Dasar dan Aplikasi Program Smart PLS 3.2.8 dalam Riset Bisnis.

- Handayani, A. R., Sudrajat, A., & Amah, N. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak UMKM dengan Religiusitas sebagai Pemoderasi (Studi Kasus pada UMKM di Kabupaten Ponorogo). Seminar Inovasi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi 3.
- Hayati, N., & Amalia, I. (2021). The effect of religiosity and moderation of morality on fraud prevention in the management of village funds. *The Indonesian Accounting Review*, 11(1), 105. <https://doi.org/10.14414/tiar.v11i1.2297>
- Heriningsih, S., Sudaryati, D., Good Governance, P., Kompetensi, D., Daya, S., Pengelolaan, M. T., Desa, D., Religiusitas, D., & Pemoderasi, S. (2019). *PENGARUH GOOD GOVERNANCE DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI PEMODERASI*. <http://www.kpk>.
- Hilda Agustin, H. A., Anggraeni Yunita, & Wenni Anggita. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan BPD Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Banyu Asin Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka). *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(3), 867–876. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i3.1191>
- Husain, S. P., Seber, I. S., & Monoarfa, V. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jambura Accounting Review Journal Homepage*, 4(1), 66–76.
- <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6622840/surat-ali-imran-ayat-104-penyeru-amar-maruf-nahi-munkar-adalah-yang-beruntung>, akses 10 Oktober 2023.
- Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). *PENGARUH KOMPETENSI PEMERINTAH DESA, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA*.
- Ismail, M., Kuncara Widagdo, A., & Widodo, A. (2016). *SISTEM AKUNTANSI PENGELOLAAN DANA DESA*.
- Iyona, F., & Badu, R. S. (2023). Jurnal Mirai Management Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Mirai Management*, 8(1), 238–252. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=27451>

- Jurnal, B. P., Publikasi, D., Estrilia, D., Wijayanti, I., & Hidayah, N. (2023). Jurnal Akuntansi dan Manajemen (JAM) Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Penerapan Sistem Akuntansi dan Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *BPJP) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta*, 20(01), 1–11. <https://doi.org/10.36406/jam.v20i01.681>
- Kaawaase, T. K., Nairuba, C., Akankunda, B., & Bananuka, J. (2021). Corporate governance, internal audit quality and financial reporting quality of financial institutions. *Asian Journal of Accounting Research*, 6(3), 348–366. <https://doi.org/10.1108/AJAR-11-2020-0117>
- Kabupaten Demak, Peraturan Bupati No. 43 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022.
- Machinjike, N., Bonga, W. G., & Hundi, S. (2021). Effectiveness of the Office of the Auditor General in Enhancing Public Sector Accountability in Zimbabwe The Effect of Increased Electricity Tarrifs on Citrus Production in Beitbridge, Zimbabwe. View project “Financial Literacy Improvement Among Women in Developing Nations: A Case for Zimbabwe” View project. In *Journal of Economics* (Vol. 9, Issue 1). www.researchjournali.com
- Mahcica Tiarno, S., & Setyo Budiwitjaksono, G. (2023). *PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAN PENGGUNAAN SISKEUDES TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA*. 7(2), 2023.
- Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, Z., Widyastuti, E., Akuntfansi, J., Negeri, P., Jalan, S., & Negara, S. (n.d.). *SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH ATAS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DI KECAMATAN SEMBAWA*. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa>
- Maulan Irwadi, Kemas Welly Angga Permana. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, Vol. 7 No. 1.
- Moh. Ridwan, R.Ery W.A.Santoso, Sulistyio S. Anindya P.R.Z Putri. (2023). Peran Moderasi Partisipasi Masyarakat Pada Hubungan Kompetensi Pengelola, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Equilibrium* Vol 12. No. 1
- Noor, J. (2014). Analisis Data Penelitian Ekonomi dan Manajemen. PT. Grasindo.

- Nursin, D., Syamsuddin, S., & Nirwana, N. (2022). Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa dengan Kecerdasan Spiritual Sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 7(1), 77–101. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1359>
- Nwoye, C. M., Anichebe, A. S., & Osegbu, I. F. (2021). Effect of Audit Quality on Earnings Management in Insurance Companies in Nigeria e. *Athens Journal of Business & Economics*, 7(2), 173–202. <https://doi.org/10.30958/ajbe.7-2-4>
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Partisipasi Masyarakat Dan Kepemimpinan Transformasional Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Desa Kecamatan Pantai Labu, P., Yasir, M., Sri Munawaroh, W., & Nusantara Al-Washliyah, M. (2023). The Effect Of Community Participation And Transformational Leadership On Village Financial Management Accountability In Pantai Labu Village, Deli Serdang District Kabupaten Deli Serdang. In *Management Studies and Entrepreneurship Journal* (Vol. 4, Issue 1). <http://journal.yrpioku.com/index.php/msej>
- Pitaloka, F. A., Supriatin, L., Azhar, N., Aini, S. Q., Fajrussalam, H., & Kunci, K. (2022). *HUMANTECH : JURNAL ILMIAH MULTIDISPLIN INDONESIA HUMANTECH JURNAL ILMIAH MULTI DISIPLIN INDONESIA PENGARUH SIKAP RELIGIUSITAS MAHASISWA TERHADAP PRESTASI BELAJAR*.
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). PENGARUH KOMPETENSI PEMERINTAH DESA, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281–298. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894>
- Raharjo, E., & STIE Pelita Nusantara Semarang, D. (2007). *in the Accounting Perspective*.
- Rahmayati, A., Chrystiana, E. T., & Accounting Major, S. (2019). *Transparency and Accountability of Village Fund Allocation Management in Wironanggan, Gatak, Sukoharjo*.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 60/2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127.

- Rizkaul Hasanah. (2018). Pengawasan Internal dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi Terhadap Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah). Repository UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Rochmat Aldy Purnomo. (2016). Rokhmat aldy. *Analisis Statistik Ekonomi Dan Bisnis Dengan SPSS, Cet. 1 – Ponorogo: WADE Group, 2016.*
- Ronal, M., Kejelasan Sasaran Anggaran, P., & Pelaporan Dan, S. (2023). *PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA LEMBANG SALU SARRE KECAMATAN SOPAI KABUPATEN TORAJA UTARA. 1.*
- Sholihin, Mahfud, dan D. R. (2021). Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 7.0. Badan penerbit ANDI.
- Silvia, L., Yuni, S., Asi, O. Y., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Bisnis, D., Palangka, U., Kampus, R., Jalan, U., Timang, H., Raya, P., & Tengah, K. (2023). PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKSESIBILITAS DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA LAWANG URU KECAMATAN BANAMA TINGANG KABUPATEN PULANG PISAU. In *Balance: Media Informasi Akuntansi dan Keuangan* (Vol. 15, Issue 1).
- Sugiyono, (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta
- Suun, M., Tenriwaru, T., & Rahim, S. (2022). Merancang Sistem Informasi Akuntansi Dan Digitalisasi Laporan Keuangan untuk Pengelolaan Dana Desa. *Celebes Journal of Community Services, 1*(2), 44–50. <https://doi.org/10.37531/celeb.v1i2.292>
- Wibisono, D. (2013). Riset Bisnis. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Widyatama, A., & Novita, L. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). In *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia* (Vol. 02, Issue 02).

LAMPIRAN

1. Kuesioner Penelitian

Berikut adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian **“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Religiusitas Perangkat Desa Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Di Desa Kecamatan Sayung dan Kecamatan Mranggen”** . Dengan itu, disela-sela kesibukan Bapak/Ibu/Saudara/i, saya memohon kesediaannya membantu saya dalam mengisi kuesioner ini. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i saya ucapkan terima kasih.

Sebelum mengisi kuesioner, dimohon untuk memberikan data-data sesuai dengan format dibawah ini :

A. Identitas Responden

Nama :
Jenis Kelamin :
Usia :
Pendidikan Terakhir :
Jabatan/Pangkat :
Lama Menjabat :
Nama Instansi :

B. Cara Pengisian Kuesioner

1. Mohon dengan hormat, bantuan dan kesediannya Bapak/Ibu untuk menjawab seluruh pernyataan/pertanyaan dalam kuesioner ini.
2. Tidak ada pernyataan benar atau salah. Bapak/Ibu mungkin saja setuju atau tidak setuju dengan pernyataan/pertanyaan tersebut. Dalam hal ini saya ingin mengetahui seberapa jauh Bapak/Ibu setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan tersebut.
3. Mohon memberi tanda centang (X) pada jawaban yang Bapak/Ibu anggap paling sesuai.
4. Tiap pertanyaan hanya diperkenankan ada satu jawaban.
5. Setelah mengisi kuesioner ini mohon Bapak/Ibu memberikan kembali kepada yang menyerahkan kuesioner ini pertama kali.
6. Terdapat 5 (lima) pilihan jawaban yang tersedia untuk masing-masing pernyataan, yaitu:

STS = Sangat Tidak Setuju (skor 1)

TS = Tidak Setuju (skor 2)

N = Netral (skor 3)

S = Setuju (skor 4)

SS = Sangat Setuju (skor 5)

Contoh pengisian :

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
				X		

DAFTAR PERNYATAAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (X₁)

No	PERNYATAAN	Kode	STS	TS	N	S	SS
			1	2	3	4	5
Lingkungan Pengendalian							
6.	Pimpinan secara terus menerus melakukan penilaian terhadap kualitas <i>lingkungan pengendalian</i> pada pelaporan dana desa						
Penilaian Risiko							
7.	Pimpinan melakukan analisis <i>penilaian risiko</i> secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap sistem pelaporan dana desa.						
Kegiatan Pengendalian							
8.	Pegawai dan atasan memahami tujuan dari <i>kegiatan pengendalian</i> pada pelaporan dana desa						
Informasi dan Komunikasi							
9.	<i>Informasi dan komunikasi</i> terkait pelaporan dana desa disediakan tepat waktu, berkelanjutan, terbuka, relevan dan efektif dengan masyarakat, rekanan dan aparat pengawas intern.						
Pemantauan							
10.	Pimpinan melakukan <i>pemantauan</i> pengendalian intern pada						

	pelaporan dana desa dan menindak lanjuti temuan serta saran.						
--	--	--	--	--	--	--	--

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (X₂)

No	PERNYATAAN	Kode	STS	TS	N	S	SS
			1	2	3	4	5
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah							
11.	Dalam pencatatan laporan keuangan dana desa dicatat sesuai dengan <i>penerapan standar akuntansi pemerintah</i> PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)						
Pencatatan Transaksi							
12.	Dalam <i>pencatatan transaksi</i> keuangan dana desa dilakukan dan dicatat menggunakan sistem keuangan berbasis teknologi						
Pembuatan Laporan Keuangan							
13.	Dalam <i>pembuatan laporan keuangan</i> dana desa dicatat sesuai dengan realitas ekonomi (Benar-bener terjadi)						

RELIGIUSITAS PERANGKAT DESA (Z)

No	PERNYATAAN	Kode	STS	TS	N	S	SS
			1	2	3	4	5
Keyakinan							
14.	<i>Keyakinan</i> perangkat desa terhadap agama dapat mendukung pelaporan dana desa yang akuntabel						
Praktik Agama							
15.	<i>Praktik agama</i> yang dilakukan perangkat desa seperti berdoa, sholat, dan sedekah dapat mendukung pelaporan dana desa yang akuntabel.						
Pengalaman Spritual							
16.	<i>Pengalaman spritual</i> yang perangkat desa alami dapat menjadikan laporan pengelolaan dana desa menjadi lebih akuntabel.						
Pengetahuan							

17.	Perangkat desa rajin mengikuti pengajian yang ada di lingkungan desa untuk menambah <i>pengetahuan</i> agar dapat mendukung pelaporan dana desa yang akuntabel.						
-----	---	--	--	--	--	--	--

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Y)

No	PERNYATAAN	Kode	STS	TS	N	S	SS
			1	2	3	4	5
Kejujuran dan Keterbukaan Informasi							
18.	<i>Kejujuran dan keterbukaan informasi</i> pemerintah desa dalam mengungkapkan kondisi dan peristiwa dalam laporan keuangan ditunjukkan melalui papan informasi/spanduk/baliho.						
Kepatuhan Pelaporan							
19.	<i>Kepatuhan pelaporan</i> keuangan desa disusun sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan disampaikan secara tepat waktu dan menyeluruh						
Kesesuaian Prosedur							
20.	Laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dihasilkan melalui <i>prosedur yang sesuai</i> .						
Kecukupan Informasi							
21.	Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa memuat <i>kecukupan informasi</i> yang akurat dan terpercaya.						
Ketepatan Penyampaian Laporan							
22.	<i>Ketepatan penyampaian laporan</i> pemerintah desa terkait pengelolaan dana desa disampaikan secara tepat waktu						

2. Dokumentasi









3. Jawaban responden masing-masing pernyataan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah					
X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	TOTAL X1
4	5	4	5	4	22
5	5	5	5	5	25
5	5	4	5	4	23
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
5	5	4	5	5	24
5	4	4	4	4	21
4	4	4	4	4	20
4	4	4	5	4	21
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
3	4	3	5	5	20
4	4	4	4	4	20
4	4	3	4	4	19
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	4	4	5	4	21
4	4	5	4	4	21
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	3	4	4	4	19
4	4	4	4	4	20
5	4	5	4	5	23
4	4	4	4	4	20
4	4	5	5	4	22
5	5	5	5	5	25
4	4	5	4	5	22
4	4	4	4	4	20
4	4	4	3	4	19
4	4	4	4	4	20
5	4	4	4	4	21

Sistem Informasi Akuntansi			
X2.1	X2.2	X2.3	TOTAL X2
3	5	5	13
5	4	5	14
4	4	3	11
4	5	5	14
4	4	4	12
5	5	4	14
5	5	5	15
4	4	4	12
4	4	4	12
4	4	4	12
4	4	4	12

4	4	4	12
3	4	4	11
4	4	4	12
4	4	4	12
5	5	5	15
4	5	4	13
4	4	5	13
5	5	4	14
4	4	4	12
5	5	5	15
4	4	4	12
4	5	5	14
4	4	4	12
5	4	5	14
4	4	4	12
4	5	4	13
4	4	5	13
4	5	5	14
4	4	4	12
4	5	4	13
4	4	4	12
4	4	4	12

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa					
Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	TOTAL Y
5	5	4	4	4	22
5	5	5	5	5	25
5	4	4	4	4	21
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
5	5	5	4	4	23
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
5	4	4	4	4	21
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
5	5	4	5	4	23
5	5	5	4	5	24
4	4	4	4	4	20
5	4	4	4	4	21
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	5	4	4	4	21
4	4	4	4	4	20
4	4	5	4	5	22
5	5	5	5	5	25

5	4	4	5	4	22
4	4	4	4	4	20
5	4	4	4	4	21
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20

Religiusitas Perangkat Desa				
Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	TOTAL Z
5	3	3	4	15
5	5	5	5	20
4	4	4	3	15
4	2	3	2	11
5	5	3	4	17
4	4	5	3	16
4	4	4	5	17
4	4	4	4	16
4	4	3	4	15
5	4	4	4	17
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
3	4	4	4	15
5	5	4	5	19
5	4	4	5	18
5	5	5	5	20
5	4	5	5	19
2	4	2	2	10
4	5	4	4	17
4	4	4	4	16
5	5	5	4	19
4	4	3	3	14
5	4	4	5	18
4	4	4	4	16
4	5	4	4	17
4	4	4	4	16
4	4	3	4	15
5	4	3	4	16
5	5	4	5	19
4	4	4	4	16
5	5	5	5	20
4	4	4	4	16
3	4	4	3	14

4. Karakteristik Responden

Persentase Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Jumlah laki laki	30	90,9%
2	Jumlah perempuan	3	9,1%
JUMLAH		33	100%

Persentase Usia Responden

No.	Usia Responden	Jumlah	Persentase
1	17-30	2	6,1%
2	31-40	5	15,2%
3	41-50	15	45,5%
4	51-60	10	30,3%
5	>60	1	3,0%
JUMLAH		33	100,0%

Persentase Pendidikan Terakhir Responden

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
1	SLTA	20	60,6%
2	D3	2	6,1%
3	S1	8	24,2%
4	S2	3	9,1%
JUMLAH		33	100,0%

Persentase Masa Kerja Responden

No.	Lama Menjabat	Jumlah	Persentase
1	1-5	11	33,3%
2	6-10	8	24,2%
3	11-15	5	15,2%
4	16-20	0	0,0%
5	>20	9	27,3%
JUMLAH		33	100,0%

5. Uji WarpPLS

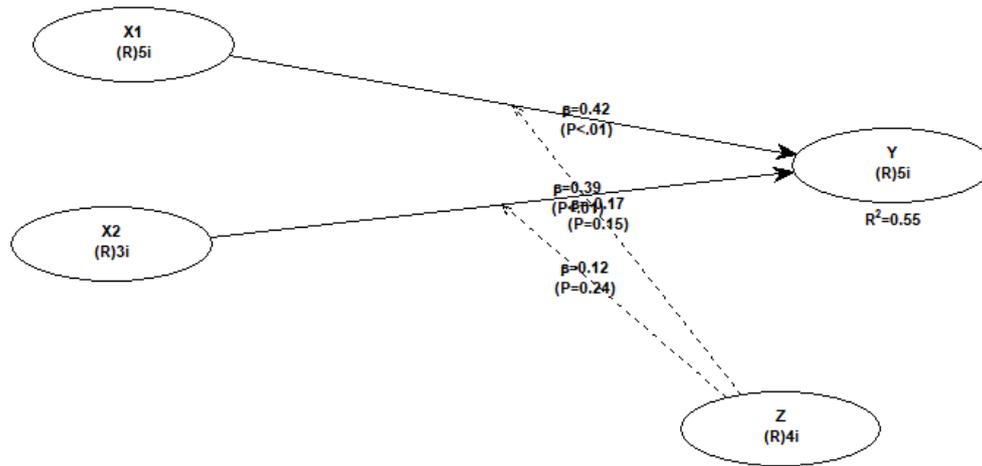
Outer Loading

	X1	X2	Z	Y	Z*X1	Z*X2	Type (as defined)	SE	P value
X1.1	(0.791)	0.000	0.104	-0.176	-0.030	-0.049	Reflective	0.120	<0.001
X1.2	(0.874)	-0.531	0.112	0.110	-0.279	0.185	Reflective	0.115	<0.001
X1.3	(0.725)	0.871	-0.010	-0.422	0.208	-0.275	Reflective	0.124	<0.001
X1.4	(0.734)	-0.426	-0.293	0.439	0.164	0.009	Reflective	0.123	<0.001
X1.5	(0.812)	0.179	0.052	0.034	-0.003	0.086	Reflective	0.119	<0.001
X2.1	0.394	(0.672)	0.234	-0.485	0.569	-0.401	Reflective	0.127	<0.001
X2.2	-0.109	(0.770)	-0.146	-0.019	-1.030	0.876	Reflective	0.121	<0.001
X2.3	-0.233	(0.779)	-0.057	0.437	0.528	-0.521	Reflective	0.120	<0.001
Z.1	0.188	-0.218	(0.770)	0.237	-0.168	-0.360	Reflective	0.121	<0.001
Z.2	-0.162	0.474	(0.711)	-0.437	0.718	-0.254	Reflective	0.124	<0.001
Z.3	0.394	-0.175	(0.757)	-0.160	-0.657	0.804	Reflective	0.122	<0.001
Z.4	-0.367	-0.041	(0.894)	0.278	0.130	-0.169	Reflective	0.114	<0.001
Y.1	0.176	-0.359	0.190	(0.767)	-0.659	0.487	Reflective	0.121	<0.001
Y.2	0.083	0.133	-0.026	(0.875)	0.114	-0.182	Reflective	0.115	<0.001
Y.3	0.007	0.140	-0.190	(0.910)	0.290	-0.200	Reflective	0.113	<0.001
Y.4	-0.041	-0.063	0.237	(0.854)	-0.282	0.260	Reflective	0.116	<0.001
Y.5	-0.199	0.095	-0.170	(0.899)	0.426	-0.283	Reflective	0.114	<0.001
Z*X1	0.000	0.000	0.000	0.000	(1.000)	0.000	Reflective	0.108	<0.001
Z*X2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	(1.000)	Reflective	0.108	<0.001

Koefisien Variabel Laten

	X1	X2	Z	Y	Z*X1	Z*X2
R-squared				0.553		
Adj. R-squared				0.489		
Composite reliab.	0.891	0.785	0.865	0.935	1.000	1.000
Cronbach's alpha	0.847	0.589	0.790	0.913	1.000	1.000
Avg. var. extrac.	0.623	0.550	0.618	0.744	1.000	1.000
Full collin. VIF	2.109	2.751	1.660	2.318	3.126	3.854
Q-squared				0.618		
Min	-1.267	-1.630	-2.784	-0.872	-3.546	-3.177
Max	1.736	1.909	1.581	1.529	2.303	2.916
Median	-0.292	-0.739	-0.176	-0.466	0.084	-0.186
Mode	-0.707	-0.739	-0.176	-0.872	0.084	-0.186
Skewness	0.796	0.470	-0.642	0.641	-0.648	0.043
Exc. kurtosis	-0.836	-0.895	0.947	-1.282	4.377	3.404
Unimodal-RS	No	Yes	Yes	No	Yes	Yes
Unimodal-KMV	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes
Normal-JB	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No
Normal-RJB	Yes	Yes	No	Yes	No	No
Histogram	View	View	View	View	View	View

Model Penelitian



Pengujian Hipotesis

Path coefficients

	X1	X2	Z	Y	Z*X1	Z*X2
X1						
X2						
Z						
Y	0.422	0.385			-0.169	0.117
Z*X1						
Z*X2						

P values

	X1	X2	Z	Y	Z*X1	Z*X2
X1						
X2						
Z						
Y	0.003	0.006			0.150	0.242
Z*X1						
Z*X2						

Uji Kecocokan Model (*Model Fit*)

WarpPLS 7.0 - General SEM analysis results
Close Help

General project information

Version of WarpPLS used: 7.0
License holder: Trial license (3 months)
Type of license: Trial license (3 months)
License start date: 16-Mar-2024
License end date: 14-Jun-2024
Project path (directory): C:\Users\ASUS\Documents\01 KULI AHHH\SKRIPSI\WALPPLS\
Project file: uji_data.prj
Last changed: 19-Mar-2024 11:31:53
Last saved: Never (needs to be saved)
Raw data path (directory): C:\Users\ASUS\Documents\01 KULI AHHH\SKRIPSI\WALPPLS\
Raw data file: DATA WALPPLS.txt

Model fit and quality indices

Average path coefficient (APC)=0.273, P=0.021
Average R-squared (ARS)=0.553, P<0.001
Average adjusted R-squared (AARS)=0.489, P<0.001
Average block VIF (AVIF)=3.519, acceptable if ≤ 5 , ideally ≤ 3.3
Average full collinearity VIF (AFVIF)=2.636, acceptable if ≤ 5 , ideally ≤ 3.3
Tenenhaus GoF (GoF)=0.646, small ≥ 0.1 , medium ≥ 0.25 , large ≥ 0.36
Simpson's paradox ratio (SPR)=0.760, acceptable if ≥ 0.7 , ideally = 1
R-squared contribution ratio (RSCR)=0.873, acceptable if ≥ 0.9 , ideally = 1
Statistical suppression ratio (SSR)=1.000, acceptable if ≥ 0.7
Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)=1.000, acceptable if ≥ 0.7

General model elements

Outer model analysis algorithm: PLS Regression
Default inner model analysis algorithm: Warp3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mukhamad Abdul Mutohar
Nomor Induk Mahasiswa : 2005046081
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 10 September 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Wringinjajar RT 01/RW 02 Mranggen Demak
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Akuntansi Syariah
Nama Orang Tua
Ayah : Suma'adi
Ibu : Siti Munazilah
No. Telp : 089644040955
Email : ahmadmuthohar10@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. MI Futuhiyyah 01 Kudu (2008 – 2014)
2. SMP Ky Ageng Giri (2014 – 2017)
3. MAN 02 Kota Semarang (2017 – 2020)
4. UIN Walisongo Semarang (2020 – 2024)

Pengalaman Organisasi

1. HMJ Akuntansi Syariah (Waka. 2021 – 2022)
2. Tax Center UIN Walisongo (Divisi Sosial dan Pelayanan 2022 – 2023)
3. Ikatan Mahasiswa Demak (Divisi Kajian dan Wacana 2022 – 2023)
4. PMII Rayon Ekonomi (Lembaga Advokasi dan Gender 2021 – 2022)